

E-NEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi Desember III 2020

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



*Lomba Baca Kitab Kuning IV
Tingkat Nasional 2020*

Gerakan *Literasi* *Nasional* di Masa Pandemi

Habib Dr.Salim Segaf Aljufri, MA



Tahun Pandemi, 'Resesi' Demokrasi dan Tantangan Ekonomi.

2020

Tetap berkhittar melayani rakyat, tidak boleh lelah menjadi pengingat dalam sepi dan ramai. Memastikan jalan bangsa berkerja bukan hanya dengan tenaga, namun juga niat serta doa yang luar biasa. Agar aman, imun dan iman berkolaborasi dengan sempurna

Demokrasi kita sedang ada di penghujung senja, jika tidak cepat menemukan cahaya maka terancam meredup dan hilang. Demokrasi kala itu secara simbolik telah diperjuangkan oleh anak-anak muda yang berseluncur di atas gedung kura-kura, sebuah hadiah istimewa yang tak terkira di awal reformasi. Meski demikian, tidak semuanya berganti karena yang lama tetap ada dan sebagian masih berkuasa.

Ternyata ranting belum

sempat memunculkan pucuk dan buah, sudah tergerogoti oleh penumpang gelap. Jadi jangan harap hadirnya demokrasi menghadirkan kesejahteraan dan keadilan, malah yang muncul penderitaan serta kesewenangan ditengah situasi pandemi berkepanjangan.

Demokrasi hari ini bagai menemukan anomali, dihilunnya riuh dengan pemilihan (election) yang melibatkan jutaan orang namun dihilirnya dikuasai sege-lintir orang. Hasilnya demokrasi

di hulu namun hilirnya oligarki. Dipupuk dengan politik transaksional yang sulit hilang, justru makin menjamur di segala sisi kehidupan. Yang berkuasa andalkan citra dan media, disisi lain yang tidak berkuasa andalkan kata-kata. Atas itupun kini mulai didesak ke ujung gelanggang.

Konflik dan perbedaan pendapat diselesaikan dengan "zero sum game", win or lose. Fungsi _check and balances_ tidak berjalan dengan sempurna, karena di paripurna tempat menyelesaikan banyak persoalan. Ironisnya di forum terbatas itupun setiap keluhan rakyat dibatasi menit dan pengeras suara.

Pendengung menjadi aktor baru penentu dalam ruang kompetisi dan narasi publik, rakyat dipaksa menelan beragam agitasi dan misinformasi. Polarisasi dibentuk, diteguhkan

dan dilembagakan. Diadu dan dibiarkan bertarung dengan neraca yang berat sebelah. Hiruk pikuk menjadi keseharian, kata-kata diumbar bagai buah yang berlabuh di pantai. hancur diterjang pemecah ombak. Tak pernah sampai kepenguasa, uniknya nyaring terdengar mendesing saat nyaring berbentuk kritik.

Ekonomi menghadapi tantangan yang tidak kalah berat. Kepuasa publik diukur dari survey yang nampak terukur di atas kertas, namun menghilang dan kabur di dalam realitas. Regulasi dikabut untuk membuka investasi yang minim proteksi, meluncur deras memporak-porandakan tatanan kehidupan banyak orang. Buruh berteriak sumbang di pertengahan, Keluhan Petani dan nelayan didengar melantun pelan. UMKM terpinggirkan.

Covid tetap menjadi

tantangan yang luar biasa dimasa lalu, saat ini dan esok hari. Kurang dari setahun negara ini belajar membentengi dengan beragam jurus dan mahzab. Karena sejak awal ramuannya tidak jelas, maka jurus tidak manjur menekan mortalitas. Rumah sakit (RS) kian terdesak karena jumlah pasien yang melonjak tajam, ketersediaan ruang yang menipis dan tenaga kesehatan berguguran.

Tetap berkhittar melayani rakyat, tidak boleh lelah menjadi pengingat dalam sepi dan ramai. Memastikan jalan bangsa berkerja bukan hanya dengan tenaga, namun juga niat serta doa yang luar biasa. Agar aman, imun dan iman berkolaborasi dengan sempurna

Lomba Baca Kitab Kuning IV Tingkat Nasional

Ketua Majelis Syuro PKS: Gerakan Literasi Tingkat Nasional di Masa Pandemi

KUTIPAN

Jakarta (22/12) – Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri, menyampaikan arahan sekaligus menutup Final Lomba Baca Kitab Kuning IV Tingkat Nasional 2020 tersebut melalui virtual pada Selasa sore (22/12/2020).

"Lomba Baca Kitab Kuning IV Tingkat Nasional 2020 ini terselenggara dalam rangka melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan," ucapnya.

Ia menyatakan, bahwa adanya lomba tersebut juga merupakan langkah untuk mempersiapkan generasi muda dengan bekal ilmu dan dasar iman yang kuat.

"Kita harus mengikat dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan budaya menulis dan membaca atau yang sekarang dikenal sebagai gerakan literasi," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa, Peradaban Islam dibangun berdasarkan prinsip

gerakan literasi yakni membaca, menulis, mendengar, menyimak, mendiskusikan, meneliti, menguji di lapangan dan menuliskan kembali hasil pengujian dan pembahasan.

Dengan demikian, ilmu pengetahuan berkembang secara objektif dan konstruktif. Dari aspek substansi, ontologi, metode, epistemologi, dan manfaat penerapan aksiologi selalu diperbarui.

"Partai Keadilan Sejahtera mencoba memberikan kontribusi kecil dengan melestarikan budaya Baca Kitab Kuning, suatu istilah untuk menggambarkan warisan ilmu pengetahuan klasik," jelasnya.

Ia juga menyatakan, bahwa lomba ini sudah berjalan sejak tahun 2016 sampai tahun 2020. Tahun 2016 diikuti oleh 1.007 peserta dari 14 Provinsi. Tahun 2017 diikuti oleh 1.994 peserta dari 16 provinsi. Tahun 2018 diikuti 802 peserta dari 12 Provinsi, dan Tahun 2020 diikuti oleh 1774 peserta dari 21 Provinsi berasal dari 216 Kabupaten/Kota, Pelajar dari 635 Pesantren dan merupakan gerakan literasi nasional yang amat membanggakan dimasa pandemi, karena membuktikan semangat belajar para santri tidak pernah padam.

"Kedudukan, kekuasaan ditangan orang beriman dan berilmu akan menjadi sarana pelindung rakyat dan penegak keadilan. Kekayaan ditangan orang beriman dan berilmu akan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sementara orang yang lنگkar dan Tandzir akan menjadikan kekuasaan sebagai alat menindas orang lain dan kekayaan akan dijadikan sarana untuk pamer kemewahan, Naudzubillahi mindzailik," tegasnya.

Ia berharap, bahwa



Habib Dr. SALIM SEGAF ALJUFRI, MA
Ketua Majelis Syuro PKS

"Kita harus mengikat dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan budaya menulis dan membaca atau yang sekarang dikenal sebagai gerakan literasi."

diantara peserta akan lahir para cendekiawan dan para ulama yang besar dibidangnya masing-masing. Sebab, Ilmu merupakan salah satu faktor utama yang akan mengangkat derajat manusia. Kehebatan manusia bukan karena kedudukan, bukan karena harta, atau keturunan bangsawan. Melainkan karena iman dan ilmu yang akan

menghasilkan amal sholeh. "Sebagai apresiasi panitia telah menyediakan hadiah total sekitar 752.220.000. Hadiah itu tidak seberapa dibandingkan dengan manfaat dan dampak yang akan diterima Umat Islam dan Bangsa Indonesia dari lahirnya generasi muda yang mencintai ilmu pengetahuan," pungkasnya.



مسابقة قراءة الكتاب فصح المعين

LOMBA BACA KITAB KUNING IV TINGKAT NASIONAL 2020



PKS

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



REKAP TOTAL LOMBA KITAB KUNING IV 2020

1747
Peserta

236
Kota/Kab.

650
Pesantren

752.220.000
Nilai Hadiah (Rupiah)

Gelar Final Lomba Baca
Kitab Kuning IV

Ketua Fraksi PKS: Bentuk Tanggung Jawab Terhadap Umat dan Bangsa

KUTIPAN

Lomba tersebut dapat terus berlanjut karena pesantren dan ulama telah hadir di Indonesia sebelum Indonesia lahir dan merdeka. Artinya telah memberikan kontribusi yang nyata dan jelas dengan penuh pengorbanannya para Ulama, Kyai maupun Santri.

Jakarta (22/12) — Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, menyampaikan maksud serta tujuan dari terselenggaranya Lomba Baca Kitab Kuning IV Tingkat Nasional 2020.

"Lomba Baca Kitab Kuning merupakan salah satu upaya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang bertujuan agar anak bangsa lebih giat lagi dalam mengkaji dan mempelajari ilmu-ilmu Islam dari para Ulama, sebagai bentuk kecintaan dan tanggung jawab terhadap Umat dan

Bangsa," jelas Jazuli dalam Acara Babak Final Lomba Baca Kitab Kuning IV Tingkat Nasional 2020 tersebut, Jakarta, Selasa (22/12/2020).

Ia menambahkan, bahwa pesantren adalah sebuah lembaga yang telah melahirkan orang-orang hebat bukan saja hebat secara intelektual tapi juga hebat dari sisi konsistensi dan integritas dirinya karena dididik dan dibina iman, spiritual serta wawasan intelektual ilmu pengetahuannya.

"Dengan kitab utamanya adalah Kitab Fathul Mu'in yang merupakan rujukan utama di berbagai pesantren bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia, karena memang isi dari kitab tersebut padat, luas dan sangat dalam," jelas Jazuli.

Ia juga sangat berharap, bahwa lomba tersebut dapat terus berlanjut karena pesantren dan ulama telah hadir di Indonesia sebelum Indonesia lahir dan merdeka. Artinya telah memberikan kontribusi yang nyata dan jelas dengan penuh pengorbanannya para Ulama, Kyai maupun Santri.

"Hadirinya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di parlemen membawa 3 risalah perjuangan yakni memperjuangkan kepentingan Umat, Rakyat, serta berkomitmen untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Jazuli.

Ia menambahkan bahwa Fraksi PKS juga merupakan Fraksi yang terdepan dalam berjuang untuk pembahasan dan terselesaikannya Undang-Undang Pesantren di Parlemen.



Lomba Baca Kitab Kuning merupakan salah satu upaya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang bertujuan agar anak bangsa lebih giat lagi dalam mengkaji dan mempelajari ilmu-ilmu Islam dari para Ulama, sebagai bentuk kecintaan dan tanggung jawab terhadap Umat dan Bangsa



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



BABAK FINAL

مسابقة قراءة الكتاب فتح العين

LOMBA BACA KITAB KUNING IV
TINGKAT NASIONAL 2020



PEMENANG BABAK FINAL

LOMBA BACA KITAB KUNING IV
TINGKAT NASIONAL 2020

22 Desember 2020

PEMENANG	NILAI	HADIAH
 JUARA 1 MAULANA ANSORI PROVINSI BANTEN	234	UMROH
 JUARA 2 HANIF JUWARDI PROVINSI KALIMANTAN BARAT	230	Rp 25.000.000
 JUARA 3 HILMI TAFTAJANI PROVINSI DKI JAKARTA	229	Rp 20.000.000
 JUARA HARAPAN 1 MAYA NUR HALIZZA PROVINSI BALI	227	Rp 15.000.000
 JUARA HARAPAN 2 AHMAD FITRIYADI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	225	Rp 10.000.000
 JUARA HARAPAN 3 M. AGUS EFENDI PROVINSI DI YOGYAKARTA	220	Rp 5.000.000

Presiden PKS: Baca Kitab Kuning di Parlemen, Gak Kalah Keren!

KUTIPAN

Jakarta (22/12) – Presiden PKS, Ahmad Syaikh, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya Lomba Baca Kitab Kuning IV Tingkat Nasional 2020

oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (22/12/2020).

"Lomba ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga literasi keilmuan karena dengan cara tersebutlah kita dapat lebih memahami Islam yang Rahmatanil'alamiin ini," ujarnya.

Ia juga menjelaskan mengenai makna "Iqra" yang kaitannya dengan Lomba Baca Kitab Kuning ini, artinya yaitu agar pandai membaca kitab kuning dengan baik serta memahami kajian-kajian Kitab Kuning dengan sempurna sehingga terciptanya pemahamannya yang dalam sehingga dapat ikut berkontribusi mencetak Ulama yang dapat menjaga persatuan ditengah-tengah umat.

"Kitab yang dibaca adalah Kitab Fathul Mu'in yang menjadi salah satu rujukan Kitab di Pesantren-Pesantren," jelasnya.

Ia juga menambahkan, agar semakin banyaknya Ulama-Ulama yang memiliki pemahaman secara luas dan mendalam agar bisa menjadi titik tolak persatuan umat.

"Semangat dalam menghidupkan suasana literasi dengan khazanah keilmuan Islam yang terselenggara ini, semoga juga akan membawa kejayaan Islam," ucapnya.

Ia juga menjelaskan, bahwa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera telah memunculkan kembali semangat yang telah lama hilang untuk melakukan Lomba Baca Kitab Kuning. Dan kini, menjadi lebih keren karena bukan hanya di Pesantren tetapi juga di Parlemen.



H. AHMAD SYAIKHU
Presiden PKS

Lomba Baca Kitab Kuning merupakan salah satu upaya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang bertujuan agar anak bangsa lebih giat lagi dalam mengkaji dan mempelajari ilmu-ilmu Islam dari para Ulama, sebagai bentuk kecintaan dan tanggung jawab terhadap Umat dan Bangsa



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



NAPAK TILAS

SANTRI DI PKS

HIDAYAT NUR WAHID

Biografi

- **Nama Lengkap :**
Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.
- **Tempat, Tanggal Lahir :**
Klaten, 8 April 1960
- **Jabatan :**
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS
Wakil Ketua MPR RI
Anggota DPR RI Dapil Jakarta II

Pendidikan di Pesantren

- Pondok Pesantren Wali Songo
di Ngabar, Siman, Ponorogo
- Pondok Modern Darussalam Gontor
Ponorogo, lulus tahun 1978



FRANSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



NAPAK TILAS

SANTRI DI PKS

AHMAD SYAIKHU

Biografi

- **Nama Lengkap :**
H. Ahmad Syaikhul
- **Tempat, Tanggal Lahir :**
Cirebon, 23 Januari 1965
- **Jabatan :**
Presiden PKS (2020-2025)
Anggota DPR RI Komisi V
Wakil Ketua BAKN

Pendidikan di Pesantren

- **Pondok Pesantren Buntet, Cirebon.**
Didirikan pada tahun 1750 oleh seorang tokoh dari Keraton Kanoman bernama Mbah Muqoyyim atau KH. Muqoyyim bin Abdul Hadi.

Soal Vaksin Impor

Wakil Ketua Fraksi PKS Minta BPK Turun Tangan

KUTIPAN

Jakarta (23/12) — Jelang berakhirnya semester II Tahun Anggaran 2020, PKS mendorong BPK RI untuk memprioritaskan audit BUMN Bio Farma khususnya terkait dengan impor vaksin Sinovac.

Mulyanto menilai publik perlu tahu alasan Pemerintah membeli vaksin yang belakangan disebut belum teruji efektifitas dan imunoginitasnya.

Selain itu, kata Mulyanto, Pemerintah perlu bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan negara secara tertib, efisien, efektif, dan transparan, termasuk dalam pembelian vaksin ini.

Mulyanto mengingatkan, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No.15/ 2006 tentang BPK disebutkan tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan

Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Sehingga, lanjut Mulyanto, BPK RI berwenang melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan Negara, termasuk impor vaksin Sinovac ini.

"Jangan sampai kewenangan besar yang diamanatkan Konstitusi menjadi mubazir," kata Mulyanto.

Mulyanto mendesak BPK RI memprioritaskan pemeriksaan impor vaksin Sinovac ini karena dikabarkan Pemerintah sudah mengimpor 3 juta dosis vaksin dengan uang muka 80%. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin sudah tiba dan disimpan di gudang Bio Farma sejak 6 Desember 2020.

Sedangkan sisanya, sebanyak 1,8 juta dosis vaksin, akan dikirim kemudian.

Menurut Mulyanto pembelian vaksin itu terasa janggal karena efikasi, mutu dan keamanan vaksin tersebut belum diketahui karena uji klinis fase III belum keluar hasilnya. Sehingga BPOM belum mengeluarkan izin edarnya.

Kondisi ini, kata Mulyanto, berpotensi merugikan keuangan Negara dalam jumlah yang tidak sedikit.

"Ini kan lucu. Orang awam pun banyak yang bertanya, kenapa kita mengimpor dan membayar 80% dari 3 juta dosis vaksin tersebut, padahal tidak ada jaminan kualitas terkait efektivitas, imunogenitas dan keamanannya bagi pengguna? Ini seperti membeli kucing dalam karung. Karena menurut logika publik sederhana, impor baru dapat dilakukan setelah diketahui kualitas, mutu dan keamanan barang yang akan diimpor, sehingga resiko terhadap keuangan negara dapat dikurangi," ujar anggota Komisi VII DPR RI ini.

Untuk itu Mulyanto mendesak BPK melaksanakan audit atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap BUMN Bio farma khususnya terkait dengan pengadaan vaksin impor Sinovac ini. Sehingga dapat diperoleh keyakinan yang cukup memadai, bahwa keuangan Negara dikelola secara cermat.



Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

BPK RI berwenang melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan Negara, termasuk impor vaksin Sinovac ini. Jangan sampai kewenangan besar yang diamanatkan Konstitusi menjadi mubazir

Sesuai dengan UU No.15/2004 Pasal 8 Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat

mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat.



PKS

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Kreatif, Atraktif, Substantif



Bicara tentang Ketahanan Keluarga

Aleg PKS: Ini adalah Tanggung Jawab Bersama

KUTIPAN

Jakarta (21/12) -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyatakan bahwa membangun ketahanan keluarga merupakan tanggung jawab berbagai pihak, bukan hanya keluarga

Hal ini disampaikannya pada Ahad (20/12/2020) dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Yayasan Srigading Indonesia, yang mengusung tema "Mewujudkan Ketahanan Keluarga Indonesia Tanggung Jawab Siapa?"

Legislator dari daerah Pemilihan Jakarta Timur ini menegaskan bahwa mewujudkan ketahanan keluarga Indonesia merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen yang terdiri dari keluarga, masyarakat dan negara.

"Untuk mewujudkan Ketahanan Keluarga Indonesia, tiga elemen tersebut harus saling bekerja sama dalam melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing," kata Anis.

Menurut Anis, bentuk tanggung jawab keluarga dalam mewujudkan ketahanan keluarga adalah dengan pemerhat-

ian dua hal, yakni: pertama, setiap keluarga menjaga anggota keluarganya dengan baik dengan memberikan pendidikan; dan kedua, pola asuh yang baik harus diberikan kepada seluruh anggota keluarga.

Sementara itu, lanjut Anis, masyarakat memiliki tanggung jawab tersendiri untuk memberikan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang anak dan pemuda.

"Lingkungan yang baik ini meliputi lingkungan fisik dan juga lingkungan non fisik, berupa keamanan dan adanya kegiatan-kegiatan positif yang melibatkan anak-anak dan pemuda untuk menumbuhkan dan mengasah potensi yang mereka miliki. Jadi ketika diluar rumah, anak dan pemuda kita mendapatkan lingkungan masyarakat yang baik yang

sesuai dengan pola asuh yang baik yang diterapkan dalam keluarga," jelasnya.

Adapun, tanggung jawab Negara adalah melindungi keluarga sesuai wewenangnya. Ia menyebutkan tiga poin wewenang negara dalam mendukung ketahanan keluarga.

"Pertama, negara perlu menegakkan Undang-undang dan aturan-aturan yang menjaga dan melindungi eksistensi keluarga. Kedua, mengawasi media informasi baik agar melakukan fungsi edukasi kepada masyarakat, dan melarang munculnya informasi atau tayangan yg menampilkan contoh-contoh buruk bagi anak-anak dan pemuda yang berdampak pada rusaknya keluarga. Dan ketiga, mengkaji ulang sistem pendidikan di setiap jenjangnya, dengan menambahkan beberapa program dalam rangka mempersiapkan siswa agar memiliki tekad membentuk keluarga yang sukses dan bahagia sesuai dengan nilai moral dan spiritual yang diyakininya".

Dalam kesempatan itu pula, secara khusus, Anis yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

“Perbaikan langsung dilakukan sesuai dengan bidang keahliannya, seperti keahlian di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, hukum, budaya, Kesehatan, dll. Sementara perbaikan tidak langsung dilakukan melalui perannya sebagai istri dan ibu”

Keuangan menekankan peran perempuan dalam memperbaiki kehidupan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.

"Perbaikan langsung dilakukan sesuai dengan bidang keahliannya, seperti keahlian di

bidang ekonomi, sosial, pendidikan, hukum, budaya, Kesehatan, dll. Sementara perbaikan tidak langsung dilakukan melalui perannya sebagai istri dan ibu", pungkas Anis.

Hari Ibu, Mufida: Kaum Ibu Harus Lebih Dilindungi di Masa Pandemi Covid-19

KUTIPAN

Jakarta (22/12) — Peringatan Hari Ibu 22 Desember 2020 dalam situasi pandemi harus jadi pengingat adanya kebijakan yang melindungi kaum ibu dari bahaya Covid-19

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengungkapkan, kasus kematian akibat covid-19 pada kelompok perempuan di Indonesia menunjukkan proporsi yang lebih tinggi yaitu 57,7 persen dibanding laki-laki yang 43,3 persen.

Melalui data, Mufida juga menyebut kelompok usia produktif 19-45 tahun menjadi yang paling banyak terkena serangan virus SARS-Cov-2 ini yaitu usia 19-30 tahun sebanyak 24,7% dan usia 31-45 tahun sebanyak 30,4%.

"Disadari atau tidak, kelompok perempuan dewasa (ibu-ibu) menjadi kelompok yang paling rentan terpapar covid-19 dan juga dengan risiko kematian yang tinggi. Banyak potensi bagi potensi tertularnya ibu dalam pandemi covid-19

ini," papar Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS ini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/12/2020)

Mufida menambahkan, ibu bisa tertular dari suami maupun anak remajanya yang bekerja atau beraktivitas di luar meskipun ibu tetap di rumah saja. Sudah cukup banyak kasus penularan dengan pola ini yang menyebabkan terjadinya klaster keluarga.

Ibu bekerja juga berpotensi terpapar di tempat bekerja atau dalam perjalanan bekerja seperti yang juga banyak terjadi. Ibu juga bisa terpapar covid-19 saat ke pasar atau berbelanja keluar memenuhi kebutuhan rumah tangga.

"Padahal dilema terbesar bagi ibu apalagi yang memiliki balita adalah ketika dirinya

terpapar covid-19, sulit untuk melakukan isolasi terkendali di tempat isolasi khusus atau di rumah sakit karena harus memberikan perhatian juga kepada balitanya. Sehingga cenderung memilih isolasi mandiri di rumah," terang Mufida.

Sebab itu, papar dia, Satgas Penanganan Covid-19 harus memberikan perhatian secara khusus pada penanganan Pandemi Covid-19 terutama pada kaum ibu dan anak.

"Bahaya yang mengancam ibu dan anak bukan hanya Covid-19. Angka kematian ibu dan anak di beberapa kabupaten/kota mengalami peningkatan saat pandemi ini. Refleksi Hari Ibu harus melahirkan tata laksana khusus penanganan kesehatan terutama Covid-19 pada ibu dan anak," ungkap Mufida.

Mufida menyebut pada peringatan Hari Ibu 2020, DPP PKS meluncurkan Gerakan Nasional PKS Peduli Ibu Sehat. Pasalnya, sehatnya ibu bisa memengaruhi kokohnya keluarga dan pada akhirnya membuat masyarakat kuat.



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

"Kalau sosok ibu di keluarga kesehatannya terganggu, stabilitas keluarga juga sedikit banyak akan terganggu. Apalagi misalnya seorang ibu terpapar Covid-19. Ada banyak hal kompleks yang akan menjadi persoalan turunan baik bagi keluarga maupun lingkungan sekitar. Sebab itulah PKS hadir dengan gerakan PKS Peduli Ibu Sehat"

"Kalau sosok ibu di keluarga kesehatannya terganggu, stabilitas keluarga juga sedikit banyak akan terganggu. Apalagi misalnya seorang ibu terpapar Covid-19. Ada banyak hal kompleks yang

akan menjadi persoalan turunan baik bagi keluarga maupun lingkungan sekitar. Sebab itulah PKS hadir dengan gerakan PKS Peduli Ibu Sehat," ujar Mufida.

Mahyeldi-Audy
Sah Menangi Pilkada

Nevi Zuarina: Itu Kemenangan Rakyat Sumbar

KUTIPAN

Padang (21/12) — Tepat dihari Minggu (20/12/2020) kemarin, penghitungan suara pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilkada) Sumbar 2020 berakhir.

Hasilnya, tidak banyak yang meleset dengan hitungan cepat saat Pilkada 9 Desember lalu. Bahkan juga tak berbeda dengan hitungan Sirekap KPU, Mahyeldi- Audy Joinaldy meraih suara rakyat terbanyak.

Paslon usungan PKS-PPP ini, dinyatakan KPU sah memenangi Pilkada Sumbar 2020 dan menjadi pemimpin warga Sumatera Barat untuk lima tahun kedepan.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Sumatera Barat, Nevi Zuarina mengucapkan selamat dan sukseskan atas perolehan suara dan dinyatakan menang Mahyeldi-Audy kepada media partner tergabung pada 'NZ Voice' Senin 21/12.

"Pertama ibu ucapkn selamat kepada Pak Mahyeldi Ansyarullah dan Pak Audy Joinaldy atas perolehan suara terbanyak. Dan terima kasih kepada seluruh kader dan simpatisan PKS

erta PPP dan relawan dari berbagai kelompok masyarakat yang bekerja siang dan malam merayu pemilih di Sumbar selama ini," ujar Nevi Zuarina.

Menurut Nevi menangnya Mahyeldi-Audy merupakan kemenangan rakyat Sumbar.

"Itu kemenangan rakyat Sumbar karena hakekat demokrasi itu adalah untuk dan dari rakyat. Pak Mahyeldi menang itu kemenangan masyarakat dalam helat

demokrasi Sumbar mencari pemimpin," ujar Nevi.

Nah, kedepan kerja berat menanti peraih amanah rakyat Sumbar itu, Sumbar ekonomi down, Indonesia pertumbuhan ekonomi minus akibat dihantam pandemi covid-19.

"Keluar dari resesi dan krisis ekonomi karena virus korona ini, adalah kerja berat. Tidak bisa andalkan gubernur dan wakil gubernur saja," ujar Nevi.

Tapi sebagai pemimpin kata Nevi, Pak Mahyeldi Insya Allah bisa menjadi yang terbaik bagi warganya.

"Pak Mahyeldi harus mampu merangkul semua pihak dan bersinergi untuk berjalan bersama membangkitkan ekonomi dan membangun Sumbar lagi. Insya Allah Sumbar bisa, karena Pemerintahan Irwan Prayitno dan Nasrul Abit telah memberikan landasan kuat untuk Sumbar survive dan keluar dari krisis pandemi covid-19 ini," ujar Anggota Komisi VI DPR RI ini.



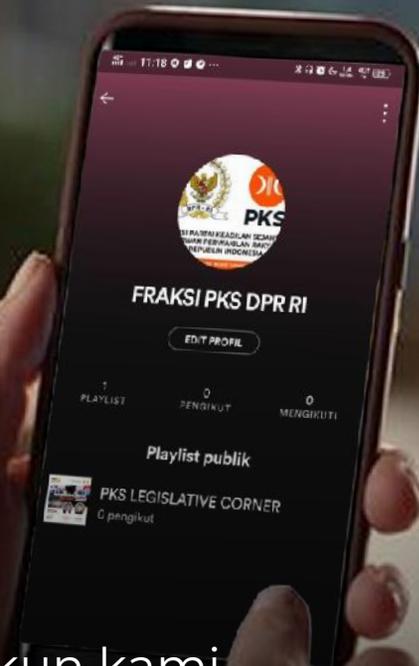
Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

"Pak Mahyeldi harus mampu merangkul semua pihak dan bersinergi untuk berjalan bersama membangkitkan ekonomi dan membangun Sumbar lagi. Insya Allah Sumbar bisa, karena Pemerintahan Irwan Prayitno dan Nasrul Abit telah memberikan landasan kuat untuk Sumbar survive dan keluar dari krisis pandemi covid-19 ini



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Follow akun kami
di Spotify



Fraksi PKS Minta Malaysia **Usut Tuntas** dan Hukum Setimpal Pembuat Parodi Lagu Indonesia Raya

KUTIPAN

Jakarta (28/12) --- Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengecam parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diunggah melalui youtube dan diduga dilakukan oleh warga negara Malaysia.

Parodi tersebut jelas merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap simbol negara Indonesia. Oleh karena itu harus disikapi secara serius oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia.

"Pelecehan dan penghinaan ini harus disikapi secara serius oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia. Pemerintah RI harus protes keras karena menyangkut marwah dan martabat Indonesia. Di sisi lain, Pemerintah Malaysia harus merespon cepat dan serius permasalahan ini. Jangan sampai mengganggu hubungan bilateral kedua

negara yang selam ini terjalin sangat baik sebagai bangsa serumpun," ungkap Jazuli.

Anggota Komisi I DPR ini mendapatkan informasi bahwa otoritas kita di Malaysia telah menyerahkan penyelidikan kasus ini kepada pemerintah Malaysia. Maka kita minta dengan tegas agar penyelidikan dilakukan dengan serius dan memastikan pelakunya mendapat hukuman yang setimpal.

"Kita menunggu hasil investigasi Pemerintah Diraja Malaysia, semoga bisa diusut tuntas. Dan jika terbukti oknum warga negara Malaysia yang melakukannya tentu sudah

sewajarnya, selain proses hukum yang tegas, otoritas Malaysia berbesar hati menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia agar suasana kondusif dan persahabatan semakin erat," pungkash Jazuli.

Video yang diunggah dua minggu lalu oleh seorang individu di YouTube "My Asean" ini menampilkan lagu kebangsaan Indonesia dengan lirik yang diubah yang menghina republik, dengan latar bendera Merah Putih dan lambang burung garuda yang diubah dengan kartun ayam.



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI



Pemerintah Malaysia harus merespon cepat dan serius permasalahan ini. Jangan sampai mengganggu hubungan bilateral kedua negara yang selam ini terjalin sangat baik sebagai bangsa serumpun



Politisi PKS: Polisi Siber Lebih Baik Urus Penipuan Online yang Rugikan Rakyat daripada Kontra Wacana

KUTIPAN

Jakarta (29/12) — Menko Polhukam, Mahfud MD, mengeluarkan pernyataan bahwa polisi siber akan semakin digencarkan di tahun 2021 mendatang.

Polisi siber yang dimaksud Mahfud berupa kontra narasi yang nantinya akan bertugas mengawasi kabar yang beredar di media sosial khususnya yang tidak benar.

Pernyataan Menko Polhukam ini direpson oleh Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta, yang menyatakan dalam pesan tertulisnya, Senin, (28/12) bahwa ada tugas polisi siber yang lebih utama yaitu mengurus ribuan penipuan online yang rugikan rakyat triliunan rupiah.

"Terkait dengan patroli polisi siber, tugas utama lain yang seharusnya ditingkatkan ialah penanganan kasus penipuan online. Dalam 5 tahun terakhir jumlah laporan mencapai 13.520 dengan total kerugian mencapai 1.17 triliun. Dari laporan tersebut laporan penipuan

online mencapai 7.047 laporan lebih banyak dari laporan penyebaran konten provokatif 6.745 kasus. Ini jumlah aduan dan kerugian yang besar namun tidak ada langkah serius dan strategis yang dilakukan pemerintah. Pemerintah malah sibuk melakukan kontra wacana terhadap pengkritiknya," papar Sukamta.

Lebih lanjut, doktor lulusan Inggris ini menyatakan bahwa fokus polisi siber yang lebih berat pada penindakan terhadap suara-suara kritis terhadap pemerintah bisa mengkebiri kebebasan berpendapat rakyat.

"Indeks kebebasan sipil Indonesia tahun 2019 menurun dibandingkan tahun 2018 akibat dari kebebasan masyarakat dalam menyuarakan pendapat merasa dihalangi atau takut bersuara. Bahkan kini jarang

kita mendengar suara kritis dari akademisi, ulama, intelektual. Memilih diam, tidak berpendapat kritis terhadap pemerintah agar aman dari pasal-pasal karet dalam UU ITE tajam dipergunakan untuk menjerat mereka yang kritis kepada pemerintah namun tumpul kepada pembela penguasa. Hal ini menjadi peseden buruk bagi kebebasan berpendapat, kebebasan berdemokrasi yang dijamin UUD 1945," terangnya.

Pemerintah menciptakan lubang hoax

Anggota DPR asal Dapil Yogyakarta ini memberikan pesan kepada Pemerintah bahwa upaya kontra wacana ataupun hoax bisa ditangkal jika Pemerintah tidak memberi ruang atau bahkan memicu wacana berkembang liar yang pada akhirnya memunculkan hoax.

"Informasi hoax seringkali muncul akibat tidak jelasnya informasi dari Pemerintah, respon yang lambat atau suatu kejadian sehingga ada lubang informasi. Lubang informasi inilah yang kemudian diisi oleh informasi hoax akibatnya



H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

"Indeks kebebasan sipil Indonesia tahun 2019 menurun dibandingkan tahun 2018 akibat dari kebebasan masyarakat dalam menyuarakan pendapat merasa dihalangi atau takut bersuara.

masyarakat termanak isu hoax. Salah satu cara yang belum dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah yaitu memaksimalkan Kominfo sebagai kementerian yang mengelola komunikasi dan informasi. Selama ini Kominfo hanya menjalankan fungsi

informasi dengan pekerjaan paling terlihat yaitu memblokir website, akun media sosial. Sedangkan fungsi komunikasi yaitu membangun komunikasi dengan berbagai pihak yang kritis belum berjalan dengan baik," pungkas Sukamta.

Ganti Wamenhan

Toriq: Jangan Sampai Hambat Perkembangan Sektor Industri Pertahanan

KUTIPAN

Tasikmalaya (23/12) --- Paska ditinggal Sakti Wahyu Trenggono yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk mengisi kursi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Jabatan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) yang kosong, akan segera diisi.

Anggota Komisi I DPR RI, Toriq Hidayat menyebutkan posisi Jabatan Wakil Menteri Pertahanan harus diisi oleh Sosok yang memiliki integritas dan kapabilitas. Mengingat tugas khusus yang diberikan Presiden kepada Wamenhan yakni mengembangkan sektor industri pertahanan Indonesia.

"Posisi Wamenhan harus segera diisi oleh sosok yang siap menjalankan tugas khusus Presiden yakni mengembangkan sektor industri pertahanan Indonesia", sebutnya.

Apalagi, Kata Politisi PKS, Menteri Pertahanan Prabowo baru saja melantik Tim Pelaksana Komite Kebijakan

Industri Pertahanan kemarin (14/12/2019) dimana salahsatunya adalah Ir. Sakti Wahyu Trenggono sebagai Sekretaris KKIP.

"Jangan sampai pergantian sosok Wamenhan sekaligus Sekretaris KKIP membuat jadwal kegiatan yang terkait pengembangan disektor industri pertahanan menjadi terhambat hanya karena tidak tepat memilih pengganti", tegas Toriq.

Menurutnya, Industri pertahanan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kekuatan pertahanan suatu negara, terlebih pada era modern sekarang ini.

"Negara yang memiliki industri pertahanan yang maju

akan mempunyai kemampuan lebih dalam kekuatan pertahanannya", tutur Toriq ia menilai pertahanan suatu negara akan lebih mumpuni bila ditunjang dengan kemampuannya memproduksi berbagai macam sarana dan prasarana pendukung pertahanan melalui industri pertahanan yang dimilikinya.

"Bagi Indonesia, upaya membangun kembali industri pertahanan merupakan kebijakan yang tak terelakkan", tutup Toriq.

**KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**

Anggota Komisi I DPR RI



"Jangan sampai pergantian sosok Wamenhan sekaligus Sekretaris KKIP membuat jadwal kegiatan yang terkait pengembangan disektor industri pertahanan menjadi terhambat hanya karena tidak tepat memilih pengganti"



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc
Anggota Komisi I DPR RI

KUTIPAN

Ganti Wamenhan

Toriq: Jangan Sampai Hambat Perkembangan Sektor Industri Pertahanan

“Jangan sampai pergantian sosok Wamenhan sekaligus Sekretaris KKIP membuat jadwal kegiatan yang terkait pengembangan disektor industri pertahanan menjadi terhambat hanya karena tidak tepat memilih pengganti”

Surahman Hidayat: Penunjukan PLT Walikota Surabaya Kebijakan yang Tepat

Jakarta (27/12) — Anggota DPR RI Komisi II dari Fraksi PKS, Surahman Hidayat mengatakan bahwa langkah Mendagri untuk segera menonaktifkan Risma sebagai walikota Surabaya merupakan kebijakan yang tepat.

Menurut Surahman, dengan dinonaktifkan Risma sebagai walikota Surabaya mengakhiri polemik rangkap jabatan.

"Saya mendukung kebijakan Mendagri untuk menonaktifkan Walikota Surabaya dan meminta Gubernur untuk segera memproses wakil walikota Surabaya sebagai PLT, sejak Walikota Surabaya dilantik sebagai Menteri Sosial," ujar Surahman.

Menurut Surahman Hidayat, Mendagri bisa membaca potensi polemik dengan baik, jika polemik ini dibiarkan lebih lama akan menimbulkan kegaduhan baru. Karena berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) tidak membenarkan adanya kepala daerah menjabat sebagai pejabat negara lainnya disaat yang sama.

Pasal 23 huruf a Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pun melarang menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.

Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengingatkan pemerintah untuk taat terhadap konstitusi dalam setiap kebijakan yang diambil.

"Pernyataan Bu Risma yang mengatakan telah mendapatkan izin dari Presiden untuk rangkap jabatan, andai hal ini benar adanya, tentunya sesuatu yang keliru dan fatal. Karena Kebijakan Presiden harus dilandaskan aturan konstitusi," pungkas Surahman.



Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.

Anggota Komisi II DPR RI

Mendagri bisa membaca potensi polemik dengan baik, jika polemik ini dibiarkan lebih lama akan menimbulkan kegaduhan baru. Karena berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) tidak membenarkan adanya kepala daerah menjabat sebagai pejabat negara lainnya disaat yang sama.

Reshuffle Kabinet, Mardani Ali Sera Minta 2 Kasus Korupsi Jangan Sampai Hilang!

KUTIPAN

Jakarta (27/12) -- Anggota FPKS DPR RI Komisi II, Mardani Ali Sera memberikan catatan penting kepada Pak Jokowi berkaitan dengan ketidakjelasan adanya Reshuffle Kabinet.

Hal ini disampaikan dalam acara PKS Legislative Corner dengan tema Reshuffle Kabinet Tambah Gaduh, di Studio Humas Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Senayan, Jumat (25/12/2020).

Mardani menyatakan, bahwa sedari awal sudah mengingatkan dan mengkritik diperiode ke-2 Pak Jokowi untuk melibatkan KPK dalam meneliti rekam jejak para calon Menteri agar arahnya lebih jelas. Sebab ia melihat pemilihan menteri tidak diikuti dengan penjelasan.

"Putaran pertama berjalan baik karena KPK dilibatkan. Akan tetapi pada putaran ke-2 KPK menayakan prosesnya tertutup, pemenangnya tidak diketahui, spesifikasinya tidak jelas, distribusinya semacam,

sehingga sebetulnya tidak ada asap kalau tidak ada api," ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa Pak Jokowi jangan marketing atau dramatisasi artinya sesuatu yang seolah masalah besar yaitu "korupsi" hal yang memaklukkan dan menyedihkan selesai hanya dengan diganti Menteri padahal itu adalah akar masalahnya.

"Ini prestasi terburuk periode ke-2 Pak Jokowi karena dalam satu tahun dan dalam 2 pekan berturut-turut ada 2 Menteri yang OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK dan dua-duanya tuduhannya korupsi," tegasnya.

Anggota DPR Komisi II tersebut menilai, bahwa ini merupakan sesuatu yang amat

naif sehingga dua korupsi benur. Seharusnya, Pak Jokowi dan KSP mampu untuk mengetahui akar masalahnya sebelum dipanggil oleh KPK, artinya dipanggil Pak Jokowi dahulu.

"Kalau saya pribadi minta Pak Jokowi minta maaf, karena 2 menteri yang ditangkap KPK itu diangkat oleh Pak Jokowi. Tambahnya segera buat audit proses, pengumuman ke Publik ini loh kesalahannya, bukan cuma mencari siapa yang salah tapi dimana letak kesalahan. Nah, kemudian diikuti sertakan dengan menteri-menteri yang lain, jadi total 6," jelas Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta I tersebut.

ardani menjelaskan, bahwa berapapun Menteri yang mau di Reshuffle itu haknya Pak Jokowi. Dan ia secara personal kepada para Menteri memberikan doa yang terbaik dan menunggu hasil kerjanya selama 100 hari kedepan, tetapi catatan tetap kepada Pak Jokowi.

"Pak Jokowi harus betul-betul membuat pengawasan yang lebih melekat kepada para

**Dr. H. MARDANI, M.Eng**

Anggota Komisi II DPR RI

Pak Jokowi harus betul-betul membuat pengawasan yang lebih melekat kepada para Menteri jangan sampai kasus memalukan dalam 2 pekan berturut-turut, 2 menteri Operasi Tangkap Tangan oleh KPK terulang,"

Menternya jangan sampai kasus memalukan dalam 2 pekan berturut-turut, 2 menteri Operasi Tangkap Tangan oleh KPK terulang," tegasnya.

Ia juga meminta, bahwa setiap 6 Menteri yang terpilih mengumumkan target kerjanya

selama 100 hari dan bagaimana roadmap untuk mencapainya serta berikan kesempatan Publik untuk mengakses prestasi-prestasi tersebut.

Aleg PKS Pantau Beras yang Menumpuk di Gudang, Bulog Diminta Kolaborasi dengan Kemensos

KUTIPAN

Jakarta (24/12) --- Legislator asal Sulawesi Selatan, Andi Akmal Pasluddin pada reses masa persidangan II TAHUN 2020-2021 ini banyak menemukan banyak fenomena menumpuknya beras di gudang-gudang milik bulog di berbagai daerah.

Anggota Komisi IV DPR RI ini mendorong Perum Bulog agar dapat berkolaborasi dengan Kementerian Sosial dalam rangka menyelesaikan program e-Warung untuk Bantuan Pangan Non Tunai yang telah diluncurkan oleh Pemerintah. "Salah solusi agar beras tidak menumpuk, pemerintah perlu membuat kebijakan yang dapat mengakibatkan beras dapat terdistribusi melalui program bantuan pangan non tunai," kata Andi Akmal Pasluddin di Jakarta.

Politisi PKS itu mengatakan bahwa Bulog terus berperan penting dalam menyangga kebutuhan pangan pokok dari rakyat Indonesia.

Untuk itu, ujarnya, maka manajemen stok pada Bulog juga perlu diperbaiki, agar tidak ada beras menumpuk hingga menjadi busuk dan merugikan Bulog.

"Kedepannya, pelayanan yang sifatnya kerakyatan ini mesti menjadi prioritas utama. Saya berharap manajemen stok diperbaiki agar tidak terjadi penumpukan beras di gudang-gudang. Dengan memperbaiki manajemen Stok, secara langsung akan berdampak pada terdistribusinya beras pada masyarakat yang tepat dengan cara cepat dan baik," katanya.

Politisi PKS ini menyarankan kepada Bulog yang juga sebagai mitra

kerjanya di Komisi IV, agar dapat menggelar rapat gabungan antara Komisi IV DPR RI dan Komisi VIII DPR sehingga dapat juga menghadirkan Kementerian Sosial untuk membahas persoalan yang menjadi hambatan dalam merealisasikan program kerja.

Akmal juga meminta kepada Bulog agar ada perbaikan mutu beras karena berdasarkan hasil verifikasi dan hasil uji laboratorium, sebanyak 29.367 ton beras Bulog dinyatakan telah mengalami turun mutu dan tidak layak konsumsi baik untuk pangan maupun pakan.

"Bulog ini lembaga logistik yang sangat strategis dalam melayani masyarakat secara masal. Di hari-hari kedepan, Bulog mesti mampu menunjukkan kinerja yang baik karena masyarakat banyak secara sadar maupun tidak sadar, telah bergantung banyak sekali kepada bulog sebagai lembaga penyangga pangan nasional", tutup Andi Akmal Pasluddin.



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

"Bulog ini lembaga logistik yang sangat strategis dalam melayani masyarakat secara masal. Di hari-hari kedepan, Bulog mesti mampu menunjukkan kinerja yang baik karena masyarakat banyak secara sadar maupun tidak sadar, telah bergantung banyak sekali kepada bulog sebagai lembaga penyangga pangan nasional".



***Mari Tetap
Patuhi Protokol
Kesehatan***

Pembangunan Perkeretaapian **Aleg PKS Tekankan Pentingnya Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan**

KUTIPAN

Jakarta (22/12) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama menyoroti pentingnya sistem pengendalian Internal dan kepatuhan terhadap UU dalam pembangunan perkeretaapian.

Menurut pria yang akrab disapa SJP ini, sejak awal perencanaan Kereta Bandara ditemukan beberapa permasalahan antara lain, perencanaan pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta kurang direncanakan secara cermat sehingga menimbulkan pemborosan keuangan perusahaan.

"Permasalahan lainnya terdapat pekerjaan yang belum diperhitungkan dalam engineer estimate oleh LAPI ITB dan ada redesign atas pondasi jembatan", terang SJP.

Kemudian, lanjut Suryadi, terkait adanya perbedaan

kualifikasi personil dan tenaga ahli yang tercantum di kontrak dengan kualifikasi personil dan tenaga ahli yang direalisasikan oleh PT Virama Karya (Persero) selaku konsultan Manajemen Proyek Jalur Kereta Api Jakarta Bandara Soekarno-Hatta.

"Terkait perubahan rencana trase jalur kereta api Bandara Soekarno-Hatta sendiri terjadi karena adanya perbedaan antara perencanaan awal berupa kajian trase yang telah dilakukan oleh LAPI-ITB dengan usul Walikota Tangerang yang menyarankan rencana trase jalur kereta api agar

berdampingan dengan rencana trase jalan tol JORR 2 agar pemanfaatan ruang dan pengadaan tanahnya optimal," papar Anggota Komisi V DPR RI ini.

Hal ini, imbuhnya, menyebabkan perencanaan awal berupa kajian trase yang telah dilakukan oleh LAPI-ITB tidak dapat digunakan sebagai bahan untuk pekerjaan pembangunan jalur kereta api Bandara Soekarno-Hatta, karena kurang koordinasi antara bagian perencanaan PT KAI dan LAPI-ITB dengan Pemerintah Kota Tangerang terkait perizinan trase.

"Sedangkan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh BPK kembali ditemukan bahwa PT KAI belum sepenuhnya memadai dalam melaksanakan proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalur kereta api Bandar Udara Soekarno Hatta, seperti terdapat perubahan desain badan jalur kereta api yang signifikan tanpa melalui perencanaan oleh konsultan perencanaan. Temuan ini ditengarai disebabkan oleh lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI)," ungkapnya.

Atas berulangnya kejadian ini, Fraksi PKS menekankan pentingnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang kuat dan perencanaan pembangunan Perkeretaapian selalu berpedoman kepada UU No.23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian



H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T
Anggota Komisi V DPR RI

sejak awal perencanaan Kereta Bandara ditemukan beberapa permasalahan antara lain, perencanaan pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta kurang direncanakan secara cermat sehingga menimbulkan pemborosan keuangan perusahaan

terutama Pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bahwa Rencana induk perkeretaapian nasional disusun dengan memperhatikan beberapa hal.

"Pertama rencana tata ruang wilayah nasional dan kedua rencana induk jaringan moda transportasi lainnya," pungkasnya.

Hal ini, kata Suryadi, agar tidak terjadi lagi adanya salah kajian akibat tidak adanya

koordinasi karena tidak memperhatikan rencana induk jaringan moda transportasi lainnya.

"Selain itu Fraksi PKS juga menekankan pentingnya verifikasi faktual terhadap seluruh jenis pengadaan pekerjaan konsultan maupun kontraktor agar pemenang pekerjaan merupakan orang-orang yang benar-benar ahli dan kompeten di bidangnya," tutup Anggota DPR asal NTB ini.

Politisi PKS Nilai Penyelenggaraan Mudik Natal dan Tahun Baru Amburadul

KUTIPAN

Surabaya (24/12) -- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo menilai penyelenggaraan mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021 amburadul.

Hal ini terlihat mulai dari padatnya antrian swab di bandara dan stasiun hingga aturan syarat perjalanan yang bersifat diskriminatif dan berubah-ubah.

"Saya katakan penyelenggaraan mudik Nataru tahun ini amburadul. Itu bisa kita lihat dari antrean calon penumpang yang ingin tes swab/rapid di bandara dan stasiun sehingga mengabaikan protokol kesehatan. Bukannya menghindari kerumunan, malah membuat kerumunan. Ini bukti konkret bahwa regulator dan operator tidak siap mengimplementasikan aturan yang mereka buat sendiri," kata Sigit yang juga anggota FPKS DPR RI.

Kedua, ketidaksiapan pemerintah dalam penyeleng-

garaan mudik Nataru juga terlihat dari penerapan aturan syarat perjalanan yang diterbitkan mendadak dan diskriminatif. Akibatnya, kata Sigit, justru membuat bingung masyarakat.

Sebagai contoh, Sigit menyebutkan perbedaan aturan transportasi yang akan masuk ke Pulau Jawa dan Bali dengan daerah lain. Untuk masuk ke pulau Jawa dan Bali, pemerintah menerapkan aturan ketat dengan persyaratan tes rapid antigen. Namun, untuk daerah lain tes rapid antigen hanya bersifat himbauan.

"Aturan ini buat bingung masyarakat dan pemda.

Akhirnya, mendadak sejumlah Pemda juga buat aturan sendiri

untuk penerapan tes antigen bagi pemudik. Ujung-ujungnya yang diberatkan ya masyarakat juga," kata Sigit.

Tak hanya itu, perbedaan persyaratan perjalanan juga ditentukan berdasarkan jenis moda transportasi yang dipilih calon penumpang. Untuk perjalanan dengan moda transportasi udara dan kereta api, Kemenhub menetapkan aturan ketat.

Hal ini berbeda dengan moda transportasi laut dan darat serta penyeberangan. Pemerintah juga mengubah aturan mengenai batas hasil tes. Jika selama ini hasil tes rapid dan swab bisa berlaku selama 14 hari, pada penyelenggaraan mudik nataru kali ini batas rapid ditentukan hanya berlaku 3x24 jam dan tes swab berlaku 7x24 jam.

"Seharusnya aturan persyaratan perjalanan berlaku sama untuk semua moda transportasi jika benar-benar ingin mencegah penyebaran covid makin meluas. Tapi, mengapa aturan yang ketat hanya berlaku untuk pesawat dan KA, sementara untuk moda transportasi laut dan darat serta kendaraan pribadi tidak ketat. Sifatnya hanya himbauan saja. Ini kan jadinya kontraproduktif," kata Sigit.

Menurut Sigit, jika dibandingkan moda transportasi lain, angkutan laut sangat berpotensi menjadi penyebar covid 19. Apalagi, pada libur Natal dan Tahun baru



I. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Komisi V DPR RI

Seharusnya aturan persyaratan perjalanan berlaku sama untuk semua moda transportasi jika benar-benar ingin mencegah penyebaran covid makin meluas.

Tapi, mengapa aturan yang ketat hanya berlaku untuk pesawat dan KA, sementara untuk moda transportasi laut dan darat serta kendaraan pribadi tidak ketat. Sifatnya hanya himbauan saja. Ini kan jadinya kontraproduktif

kali ini hanya angkutan laut yang diprediksi mengalami kenaikan jumlah penumpang

"Berbeda dengan penumpang KA dan pesawat yang memang sudah

menerapkan protokol kesehatan ketat, tidak semua penumpang kapal dipastikan bisa ikut aturan 3M.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Cegah Skandal di BUMN

Politisi PKS Desak Pemerintah Serious Jalankan 'Early Warning System'

KUTIPAN

Surabaya (23/12) -- Belum hilang ingatan publik terhadap megaskandal PT Jiwasraya yang merugikan keuangan negara Rp16,8 triliun.

Bahkan penyelesaian kasus tersebut sampai sekarang masih dalam proses.

Hari-hari ini publik kembali dipertontonkan dengan megaskandal PT Asabri yang menurut Kejaksaan Agung berpotensi mengalami kerugian negara hingga Rp17 triliun.

Kejaksaan Agung sendiri mengacu pada hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas keuangan PT Asabri tahun 2019.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak Pemerintah untuk lebih serius menerapkan early warning system (sistem peringatan dini) dalam pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Terulangnnya skandal keuangan di BUMN dengan pola

dan modus operandi yang mirip, mengindikasikan tidak bekerjanya sistem pengawasan terhadap pengelolaan BUMN.

"Rakyat dipertontonkan kasus yang terus berulang dengan pola yang sama. Jiwasraya dan Asabri hanya merupakan contoh bobroknya perilaku penyelenggara BUMN. Bagaimana sistem peringatan dini Kementerian BUMN bekerja?" tanya Amin.

Berdasarkan audit BPK atas laporan keuangan PT Asabri tahun 2019, ditemukan adanya kelemahan pada sistem pengendalian internal perseroan. BPK juga menyatakan penilaian harga saham portofolio dan pernyataan rekasa dana tidak masuk akal karena tidak mengikuti standar

akuntansi yang berlaku.

Salah satu indikasinya adalah valuasi dan harga rekasa dana pada 2019 yang nyaris tidak beranjak dari 2018. Kerugian investasi akibat penurunan harga saham dan unit rekasa dana pada 2019 masing-masing mencapai Rp 5,28 triliun dan Rp 2,2 triliun.

BPK juga melaporkan, kerugian yang dialami BUMN pengelola dana pensiun TNI dan Polri itu masih terkait dua tersangka kasus Jiwasraya. Dan praktik moral hazard tersebut terindikasi sudah dilakukan sejak lama dan potensi kerugian yang cukup besar terjadi pada jajaran direksi Asabri sebelumnya.

"Kementerian BUMN harusnya bisa bergerak cepat memeriksa semua indikasi yang ada. Seharusnya praktik-praktik moral hazard bisa dicegah sejak dini," tegas mantan auditor BPKP itu.

Berdasarkan penelusuran, PT Asabri memiliki portofolio investasi di perusahaan milik Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputra, seperti PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) dan PT Hanson International Tbk (MYRX). Keduanya merupakan tersangka utama dalam kasus skandal Jiwasraya.

BPK melaporkan, akibat masalah investasi, rasio modal berbasis risiko (RBC) PT Asabri minus 571 persen pada akhir 2019 dan diprediksi terus turun hingga minus 643,49 persen pada tahun ini.



AMIN AK, M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI

"Kementerian BUMN harusnya bisa bergerak cepat memeriksa semua indikasi yang ada. Seharusnya praktik-praktik moral hazard bisa dicegah sejak dini,"

Padahal, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), RBC minimal perusahaan asuransi ditetapkan 120 persen, membuat Asabri harus menambah asetnya sebesar Rp 7,26 triliun untuk memenuhi persyaratan.

BPK juga mengungkapkan temuan atas laporan keuangan PT Asabri yang unaudited 2019, penilaian investasi yang absurd,

dan penurunan nilai investasi akumulasi dana pensiun (AIP) yang belum diukur secara akurat.

BPK memperkirakan pemerintah, sebagai pemegang saham mayoritas PT Asabri, harus menanggung kerugian komprehensif PT Asabri di tahun 2019 hingga Rp 8,4 triliun.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Rapor Merah Pemerintah
Tahun 2020 di Bidang Energi

Aleg FPKS: Masih Banyak PR Yang Harus Diselesaikan!

KUTIPAN

Jakarta (29/12) -- Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto memberi catatan terhadap kinerja Pemerintah dalam bidang energi jelang akhir tahun 2020, Jakarta, Selasa (29/12/2020).

Mulyanto menilai, bahwa sepanjang tahun 2020, kinerja Pemerintah dalam pengelolaan sektor energi seperti listrik, BBM dan mineral relatif biasa-biasa saja dan cenderung merah.

Di bidang kelistrikan, Mulyanto mencatat ada beberapa kejadian yang menjadi penilaian buruk Pemerintah. Diantaranya, peristiwa padam listrik se-Jawa akibat pohon sengon.

Menurut Mulyanto kejadian ini sangat tidak masuk akal dan menunjukkan rapuhnya sistem keandalan kelistrikan nasional.

"Saya bayangkan betapa rentannya sistem pertahanan kita. Jangankan diserang oleh negara lain, disenggol pohon sengon saja suplai listrik se-Jawa sudah padam.

Kalau dalam teori pertahanan keamanan, pulau Jawa itu jantung pertahanan nasional. Kalau jantung pertahanannya saja mudah dilumpuhkan apalagi wilayah lainnya.

Infrastruktur listrik itu termasuk objek vital yang perlu dijaga dengan sungguh-sungguh," tegas Mulyanto.

Hal lain yang disorot Mulyanto terkait kelistrikan adalah terjadinya lonjakan tagihan listrik masyarakat disaat pandemi COVID 19. Dalam kondisi kepanikan masyarakat karena pandemi, PLN selaku operator listrik negara, yang seharusnya memberi kenyamanan malah menambah kepanikan. Mulyanto menyoroti ketidaksiapan PLN dalam

melayani keluhan pelanggan.

"Kacau betul situasi kita pada saat itu. Masyarakat dibuat panik karena tagihan listriknya melonjak.

Menghadapi situasi seperti itu PLN bukannya memberi pelayanan yang lebih menenangkan malah mengeluarkan pernyataan yang mengundang emosi masyarakat," kenang Mulyanto.

Selain dua peristiwa tadi, masih ada peristiwa lain terkait ketenagalistrikan yang menurut Mulyanto menjadi catatan kurang baik bagi Pemerintah. Diantaranya, over supply listrik dan membengkaknya utang PLN. Sementara tingkat elektrifikasi masih belum merata, terutama di wilayah Indonesia Timur.

"Intinya masih banyak PR yang harus diselesaikan Pemerintah di sektor kelistrikan ini," kata Mulyanto.

Di sektor BBM ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah. Diantaranya, mahalnya harga BBM disaat harga minyak dunia anjlok ke titik terendah sepanjang sejarah.



Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Inbang

Saya bayangkan betapa rentannya sistem pertahanan kita. Jangankan diserang oleh negara lain, disenggol pohon sengon saja suplai listrik se-Jawa sudah padam. Kalau dalam teori pertahanan keamanan, pulau Jawa itu jantung pertahanan nasional. Kalau jantung pertahanannya saja mudah dilumpuhkan apalagi wilayah lainnya. Infrastruktur listrik itu termasuk objek vital yang perlu dijaga dengan sungguh-sungguh

Menurut Mulyanto, kejadian itu aib Pemerintah yang tidak boleh terulang. Jika di masa lalu Pemerintah menyediakan subsidi BBM pada rakyat, tapi dengan kejadian itu

terkesan sebaliknya, justru rakyat yang memberi subsidi pada Perusahaan Pemerintah.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

● KUTIPAN

Legislator PKS Minta Pemerintah **Konsisten** Larang Ekspor Bijih Nikel Mentah



Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

“Saya berharap Pemerintah sudah mengkordinasikan semua lembaga terkait pelarangan ekspor bijih nikel mentah ini. Jangan sampai kebijakan ini hanya baik di atas kertas tapi berantakan di tataran pelaksanaan.

Untuk itu Pemerintah perlu memperkuat aspek pengawasan agar kebijakan ini dapat dilaksanakan secara efektif,”

Lansia Meninggal Saat Antri Pengambilan Bansos

Pemerintah **Wajib** Minta Maaf dan Santuni Keluarganya!

KUTIPAN

Jakarta (28/12) — Seorang wanita lansia meninggal dunia saat mengantri untuk memperoleh bansos di Kantor Kelurahan Sukatani, Kota Depok, Jawa Barat.

Merespons kabar tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf angkat bicara. Bukhori menyalurkan insiden wafatnya salah seorang penerima manfaat ketika penyaluran bansos dilakukan.

“Bansos sejatinya bertujuan untuk mempertahankan eksistensi kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan. Sebaliknya, segala bentuk bantuan yang dapat menimbulkan petaka atau bahaya kematian justru bertentangan dengan tujuan utama bansos itu sendiri. Ironisnya, insiden di Depok tersebut menguak catatan buruk terhadap model pendistribusian bansos yang dilakukan selama ini sehingga

harus segera dievaluasi,” tegasnya di Jakarta, Senin (28/12).

Politisi PKS ini meminta supaya strategi penyaluran bansos di waktu mendatang harus dilakukan dengan cara yang bermartabat dan mengedepankan aspek kemanusiaan. Menurutnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengubah mindset pemerintah terhadap bansos.

“Harus ada mindset yang diubah terkait definisi bantuan sosial. Pertama, bantuan sosial adalah upaya pemerintah menghormati hak rakyatnya sebagaimana amanat konstitusi. Kedua, bansos bukanlah sedekah pemerintah terhadap rakyatnya, tetapi hak rakyat

yang sudah semestinya diberikan oleh pemerintah dengan cara bermartabat. Sehingga, rakyat tidak boleh dihina dengan dipaksa mengantri di kelurahan atau tempat lain yang telah ditentukan. Tidak hanya itu, cara konservatif seperti itu justru hanya akan memicu kerumunan sehingga timbul masalah baru akibat bansos,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Ketua DPP PKS ini mendesak supaya pemerintah mengambil inisiatif lebih dalam penyaluran bansos. Ia meminta supaya penyaluran bansos di waktu mendatang bisa diantarkan secara langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Menurutnya, strategi “antar bola” ini lebih efektif dan manusiawi.

“Pemerintah perlu memberdayakan petugas di tingkat kecamatan, kelurahan, atau jika perlu menggendong RT dalam menyalurkan bansos secara langsung kepada masyarakat. Sebab, ada banyak nilai positif dari strategi seperti ini bila diterapkan,”

“Pertama, kepastian bansos bisa sampai tepat sasaran. Karena, strategi ini memberikan petugas kesempatan untuk melakukan verifikasi ulang di lapangan terkait kelayakan penerima manfaat dari data yang telah disetorkan oleh RT selama ini.



KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

“Pemerintah perlu memberdayakan petugas di tingkat kecamatan, kelurahan, atau jika perlu menggendong RT dalam menyalurkan bansos secara langsung kepada masyarakat. Sebab, ada banyak nilai positif dari strategi seperti ini bila diterapkan,”

Hal ini penting untuk mencegah, bahkan, menghentikan bansos yang selama ini dianggap salah sasaran. Kedua, mencegah terjadinya antrian sehingga berpotensi memicu kerumunan di kantor kelurahan di tengah situasi Covid-19.

Ketiga, simpati dari masyarakat. Sebab, mereka akan merasa dimudahkan dan dimuliakan dengan model pembagian bansos yang disalurkan dengan cara yang patut,” jelasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Kunker saat Reses

Nur Azizah Tinjau Pembelajaran Daring di MAN Insan Cendikia Batam

KUTIPAN

Batam (24/12) -- Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid, dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Senin (14/12/2020),

melakukan peninjauan pembelajaran daring ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendikia (IC) Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Peninjauan Lapangan dilakukan terkait Proses Belajar-Mengajar selama Masa Pandemi Covid 19.

Nur Azizah, dari Fraksi PKS hadir bersama tim Komisi VIII dari berbagai Fraksi yang dipimpin Marwan Dasopang dari Fraksi PKB.

Pada kesempatan ini turut hadir Kepala Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota

Batam Muhammad Dirham.

Bersama Rombongan Tim Komisi VIII beserta Kepala Kantor Wilayah (KaKanwil) Kemenag Kepri, Nur Azizah berkunjung ke MAN Insan Cendikia Batam yang sedang menyempurnakan proses pembangunan yang menggunakan dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Marwan Dasopang selaku ketua Tim Kunker Reses Komisi VIII, ia berharap serapan dana hingga akhir tahun bisa diatas

97%. Dimana pada masa pandemi Covid-19 ini, serapan dana banyak di alokasikan untuk menunjang pembelajaran daring serta pembangunan sarana belajar yang mendesak.

Meski saat ini pembelajaran daring berlanjut, MAN Insan Cendikia Batam terus berinovasi menyesuaikan perkembangan zaman dan tanggap situasi serta kondisi. MAN IC Batam tetap berkomitmen menjaga kualitas.

Beberapa langkah dan upaya pun dilakukan agar komitmen yang telah dibuat berjalan dengan baik.

Pertama, memberikan pembekalan kepada Tenaga Pendidik MAN IC Batam terkait metode pembelajaran di masa pandemi, Kedua, melakukan pertemuan secara daring dengan orang tua siswa, serta tetap menciptakan suasana belajar yang nyaman dan tertib.

Pada kesempatan ini, Nur Azizah turut menyampaikan harapannya kepada Kepala Sekolah MAN Insan Cendikia Batam, agar MAN Unggulan ini harus tetap mengajarkan Kurikulum Kitab Kuning sebagai dasar untuk memahami dan mempraktekan Bahasa Arab 'Fushah' dan beberapa Kitab Fiqh dasar, agar para siswa memiliki bekal yg baik saat melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

**Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.**

Anggota Komisi VIII DPR RI

Beberapa langkah dan upaya pun dilakukan agar komitmen yang telah dibuat berjalan dengan baik. Pertama, memberikan pembekalan kepada Tenaga Pendidik MAN IC Batam terkait metode pembelajaran di masa pandemi, Kedua, melakukan pertemuan secara daring dengan orang tua siswa, serta tetap menciptakan suasana belajar yang nyaman dan tertib



6 MENTERI BARU KABINET INDONESIA MAJU

Tri Rismaharini | Menteri Sosial
Sandiaga Salahudin Uno | Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Budi Gunadi Sadikin | Menteri Kesehatan.
Yaqut Cholil Quoumas | Menteri Agama
Mohamad Lutfi | Menteri Perdagangan.
Wahyu Sakti Trenggono | Wakil Menteri Pertahanan

Mufida Siap **Kolaborasi** dengan DPW dan DPD PKS Terpilih dalam Melayani Rakyat

KUTIPAN

Jakarta (29/12) --- Anggota Fraksi PKS DPR RI Kurniasih Mufidayati mengucapkan selamat atas hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Keadilan Sejahtera di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota secara serentak 27-28 Desember 2020.

Mufida mengatakan proses pemilihan kepemimpinan baru PKS di setiap tingkat selalu melibatkan kader. Hasil dari penjurian kader kemudian dibahas dan diputuskan dalam susunan kepemimpinan baru periode 2020-2025.

"Dan pertama kalinya dalam sejarah PKS, Muswil dan Musda digelar secara serentak se-Indonesia. Alhamdulillah, Semua berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Inilah ciri khas PKS, tidak ada kepentingan pribadi dalam pergantian pengurus di setiap

level," papar Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga ini di Jakarta, Selasa (29/12/2020).

Anggota Komisi IX DPR RI ini mengungkapkan, pihaknya sebagai anggota legislatif siap berkolaborasi dengan struktur PKS dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.

"Seperti arahan Presiden PKS, anggota dewan adalah perpanjangan tangan beliau dalam menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat. Kami di DPR siap berkolaborasi dengan struktur

PKS di wilayah dan daerah yang baru dilantik untuk melipatgandakan suara PKS dengan pelayanan kepada masyarakat," kata dia.

Ia menyebut, kolaborasi program ini sebagai wujud kontribusi PKS bagi pembangunan umat dan bangsa menuju masyarakat yang Madani.

"Sebagai Partai yang Rahmatan lil 'alamiin, tentu saja kami ingin turut serta ambil peran dalam pembangunan di Indonesia dengan memberikan masukan-masukan secara substantif untuk program-program di semua bidang, khususnya bidang ketenagakerjaan dan kesehatan agar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Semoga struktur PKS di provinsi dan kabupaten/kota bisa menghasilkan program kerja yang turut mengawal isu ketenagakerjaan dan kesehatan Indonesia," imbuhnya.



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
Anggota Komisi IX DPR RI



Dan pertama kalinya dalam sejarah PKS, Muswil dan Musda digelar secara serentak se-Indonesia. Alhamdulillah, Semua berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Inilah ciri khas PKS, tidak ada kepentingan pribadi dalam pergantian pengurus di setiap level,

Budi Gunadi Jadi Menkes

PKS: Kita Butuh yang Paham Kesehatan Bukan Ekonomi

KUTIPAN

Jakarta (23/12) — Budi Gunadi Sadikin ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Kesehatan (Menkes) RI menggantikan Terawan Agus Putranto.

PKS menyebut Budi Gunadi Sadikin merupakan Menkes RI pertama yang tidak berasal dari bidang kesehatan.

"Penunjukan Budi Gunadi Sadikin sebagai Menkes menggantikan Terawan cukup mengundang perhatian. Ini baru pertama kali Kementerian Kesehatan dipimpin oleh orang yang bukan berlatar belakang kesehatan atau dokter. Budi Gunadi Sadikin lebih dikenal sebagai pengusaha," ujar Ketua DPP PKS Netty Prasetiyani kepada wartawan, Rabu (23/12).

Anggota Komisi IX DPR RI itu mengatakan saat ini Indonesia masih dalam upaya melawan pandemi COVID-19.

Menurutnya, dibutuhkan sosok Menkes yang bisa memahami pandemi Corona dari sudut pandang kesehatan,

bukan hanya dari sudut pandang ekonomi semata.

"Kita butuh sosok menteri kesehatan yang memahami pandemi COVID-19 sebagai persoalan berbasis kesehatan, bukan dipandang dari kacamata ekonomi dan moneter. Selesaikan dulu basis persoalan kesehatannya, baru pemulihan ekonomi," ungkapnya.

Netty enggan memberikan penilaian awal terhadap kinerja Budi G Sadikin sebagai Menkes. Ia hanya menegaskan Kemenkes adalah leading sector penanganan pandemi Corona.

"Saya tidak berani memprediksi apakah pergantian ini akan membuat Kemenkes memiliki kewenangan penuh menjadi leading sector penanganan

pandemi COVID-19, membawa Indonesia lepas dari pandemi, atau malah membuat sistem kesehatan kita makin parah karena ditangani oleh bukan ahlinya," ungkapnya.

Kendati demikian, Netty mengatakan pergantian Menkes adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Ia berharap Budi dapat memastikan masyarakat mendapatkan hak kesehatan.

"Pergantian Menkes telah diputuskan oleh presiden. Saatnya kita melihat, perbaikan apa yang akan terjadi dalam sistem kesehatan kita. Selamat bekerja, Pak Budi. Pastikan rakyat Indonesia mendapatkan hak kesehatannya dengan baik," ujarnya.



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI



Penunjukan Budi Gunadi Sadikin sebagai Menkes menggantikan Terawan cukup mengundang perhatian. Ini baru pertama kali Kementerian Kesehatan dipimpin oleh orang yang bukan berlatar belakang kesehatan atau dokter. Budi Gunadi Sadikin lebih dikenal sebagai pengusaha,

Reshuffle Kabinet Jokowi

Ledia Hanifa: Sandiaga Uno Mesti Cermat Melihat Peluang

KUTIPAN

Jakarta (23/12) — Anggota FPKS DPR RI Dapil Jawa Barat I Kota Bandung dan Kota Cimahi, Ledia Hanifa menyampaikan catatan penting untuk Sandiaga Uno sebagai Menparekras terpilih yang menggantikan Wishnutama, Jakarta, Rabu (23/12).

Ledia menegaskan, bahwa Penggantian Menteri adalah hak prerogatif Presiden sehingga sangat diperlukan beberapa catatan.

"Saya memandang keduanya memiliki latar belakang sebagai pengusaha (meski dari bidang yang berbeda) tentu semestinya bisa lebih cermat melihat peluang-peluang. Bang Sandi juga orang yang siap turun ke lapangan untuk mendapatkan peta masalah dan peluang-peluangnya," ujar Anggota Komisi X DPR RI itu.

"Pariwisata merupakan sektor yang paling terpuruk akibat pandemi. Dan diprediksi paling akhir bangkitnya. Sektor

ini melibatkan banyak stakeholder termasuk masyarakat disekitar destinasi wisata. Penanganannya harus sangat cermat dan hati-hati," tegas Sekretaris FPKS tersebut.

Ledia menambahkan, sinergi lintas sektor untuk menumbuhkan Pariwisata kita sangat penting diperkuat. Seperti antar Kementerian/Lembaga, dengan Pemerintah Daerah, organisasi

"Sektor ekonomi kreatif kita perlu didorong pelindungannya. Selain dengan Hak Kekayaan Intelektual juga dengan mencatatkan Indikasi Geografis sebagai bukti kekayaan budaya dan kreatifitas kita," jelas Anggota DPR Dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi I.

Kemudian, ia juga berharap, agar penunjukan ini bisa semakin mempercepat pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**

Anggota Komisi X DPR RI

Pariwisata merupakan sektor yang paling terpuruk akibat pandemi. Dan diprediksi paling akhir bangkitnya. Sektor ini melibatkan banyak stakeholder termasuk masyarakat disekitar destinasi wisata. Penanganannya harus sangat cermat dan hati-hati,"

Direksi Bank Syariah Indonesia Diminta Pertimbangkan Wacana Penarikan Dana Muhammadiyah

KUTIPAN

Jakarta (23/12) --- Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah sedang mengkaji penarikan dananya dari Bank Syariah Indonesia hasil merger 3 Bank BUMN Syariah.

Wacana penarikan dana oleh Muhammadiyah dikarenakan belum jelasnya komitmen pengalokasian pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly meminta kepada Bank Syariah Indonesia untuk mempertimbangkan secara bijak wacana penarikan dana oleh organisasi masyarakat terbesar di Indonesia ini.

"Perlu dipertimbangkan secara bijak dan serius wacana penarikan dana ini, hal ini berpotensi merugikan perseroan di tengah euforia lahirnya BSI," ujar Junaidi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu,

(23/12).

Lebih lanjut, Aleg Fraksi PKS ini mengatakan BSI dipacu untuk bersaing dengan bank konvensional secara bisnis, tetapi lahirnya BSI ini juga harus memperhatikan kepentingan ummat dan UMKM yang secara jelas tetap bertahan di tengah krisis ekonomi dan pandemi juga telah membangkitkan ekonomi nasional.

Selain itu, lanjut Junaidi, saat ini Muhammadiyah merupakan organisasi ummat yang memiliki asset dengan tata kelola yang cukup baik. Data Wikipedia diantara amal usaha yang dimiliki organisasi yang sudah berumur 108 tahun ini yaitu di bidang pendidikan dasar dan menengah memiliki

7.651 sekolah dan madrasah, pendidikan tinggi 174 universitas, di bidang pelayanan kesehatan dan kesejahteraan ada 457 rumah sakit, 318 panti asuhan, 54 panti jompo, dan 82 tempat rehabilitasi cacat. Di bidang sarana ibadah terdapat masjid dan mushalla sebanyak 11.198. Selain itu ada juga dana likuid (jangka pendek) yang tersimpan di bank syariah berupa tabungan, giro, deposito yang diperkirakan mencapai Rp 15 triliun.

"Dengan amal usaha yang dimiliki, mereka tetap memiliki komitmen yang kuat dalam program pemberdayaan UMKM terbuka dengan misi ekonomi Muhammadiyah yaitu memajukan ekonomi ummat dan rakyat serta UMKM," jelas Junaidi.

Politisi dari Dapil Lampung II ini menegaskan kembali agar BSI melakukan konsolidasi kepada organisasi masyarakat yang memiliki simpanan dana di bank syariah hasil merger.

Kepentingan ekonomi ummat dan UMKM perlu diperhatikan lebih serius agar target utama menciptakan kesejahteraan dan

**Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Lampung I

BSI dipacu untuk bersaing dengan bank konvensional secara bisnis, tetapi lahirnya

BSI ini juga harus memperhatikan kepentingan ummat dan UMKM yang secara jelas tetap bertahan di tengah krisis ekonomi dan pandemi juga telah membangkitkan ekonomi nasional.

makmurnya yang lebih merata untuk rakyat bisa tercapai.

"Saat pandemi ini sangat penting menjaga faktor kepercayaan ummat kepada bank syariah dalam menyimpan

dananya, konsolidasi dan kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan perlu dilakukan untuk memajukan pelaku UMKM," pungkash Junaidi.



Dukung Tradisi Ziarah Walisongo, Aleg PKS **Sumbang** **Dana** untuk Pengadaan Bus

99 KUTIPAN



Tradisi ziarah sangat bagus terutama untuk napak tilas berkeliling tempat-tempat yang menyimpan sejarah perjuangan para wali dan ulama. Juga sebagai wujud terima kasih atas perjuangan mereka yang menyebarkan Islam, khususnya tanah di Jawa.

AMIN AK, M.M.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Timur IV

Dukung Tradisi Ziarah, Amin Ak Sumbang Dana untuk Pengadaan Bus

KUTIPAN

Lumajang (29/12) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Dapil Jatim IV, Amin Ak menyumbang dana Rp100 juta untuk pengadaan bus pariwisata untuk melayani masyarakat Lumajang.

Hal itu merupakan bentuk dukungan Amin pada tradisi ziarah ke makam para wali dan ulama serta silaturahmi ke kediaman kyai dan ulama.

“Operasional sehari-hari bus ini akan dikelola oleh DPD PKS Kabupaten Lumajang. Kami mendukung tradisi dan kebiasaan baik masyarakat, khususnya dalam menapaktisasi perjuangan para wali dan ulama di tanah air,” beber Amin.

Lebih lanjut Amin mengatakan, masyarakat Lumajang dan Jember juga memiliki kebiasaan positif lainnya antara lain menghadiri acara haul para habaib, ulama dan kyai, peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW dan mengunjungi tempat wisata religi.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh komunitas

masyarakat dalam jumlah anggota banyak, misalnya jamaah sholatatan, jamaah yasinan, pengurus dan anggota ormas, karang taruna dan kelompok masyarakat lainnya.

“Semoga bantuan ini bisa meringankan beban jamaah karena selama ini mereka menyewa kendaraan beberapa minibus kecil atau bus besar untuk kegiatan tersebut,” kata Amin.

Menurut Anggota Komisi IV DPR RI itu, tradisi ziarah sangat bagus terutama untuk napak tilas berkeliling tempat-tempat yang menyimpan sejarah perjuangan para wali dan ulama. Juga sebagai wujud terima kasih atas perjuangan mereka yang menyebarkan Islam, khususnya tanah di Jawa.

Sejumlah lokasi yang biasa dikunjungi antara lain makam

Sunan Ampel, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri. Selajutnya bergerak ke utara ke Sunan Drajat di Lamongan dan Sunan Bonang di Tuban.

Dari wilayah Jawa Timur akan diteruskan ke Sunan Muria, Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus, ketiganya di Jawa Tengah. Terakhir ke Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat. Beberapa rombongan jamaah juga berziarah ke makam Syekh Jumadil Qubro di Mojokerto, KH Abdul Hamid di Pasuruan, Syekh Kholli di Bangkalan.



AMIN AK, M.M.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Timur IV

“Operasional sehari-hari bus ini akan dikelola oleh DPD PKS Kabupaten Lumajang. Kami mendukung tradisi dan kebiasaan baik masyarakat, khususnya dalam menapaktisasi perjuangan para wali dan ulama di tanah air.

Nevi Zuairina Serahkan Bantuan Pembangunan Renovasi Panti Asuhan dan Masjid

KUTIPAN

Pasaman (29/12) — Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Nevi Zuairina menyerahkan bantuan secara simbolis pembangunan renovasi Panti Asuhan Aisyiyah

di Kam-pung Pinang Sei Jernih Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman.

Di waktu yang bersamaan, Aleg DPR RI juga menyerahkan bantuan kepada Masjid Al Ikhlas Sopan Saiyo di Jorong Beringin Nagari Persiapan Lansek Kadok Barat, Kec Rao Selatan Kab Pasaman.

Acara penyerahan bantuan ini bertempat di Panti Asuhan Aisyiyah dimana di hadir oleh semua Pengurus Yayasan Aisyiyah dan Masjid Al Ikhlas.

"Sebuah kegembiraan tersendiri bagi saya, ketika ada kontribusi kepada masyarakat yang dapat terrealisasi secara nyata. Ini bukanlah kali pertama, dan bukan juga yang terakhir. Saya terus berusaha, pemeratakan bantuan ini sampai ke pelosok, terutama daerah pemilihan saya yang

menjadi tanggung jawab saya sebagai anggota DPR RI", ucap Nevi di depan seluruh audiens yang hadir pada penyerahan bantuan tersebut.

Legislator perempuan asal PKS ini dalam setiap pekannya, tidak melewatkan kegiatan-kegiatan bertemu masyarakat dengan membawa kontribusi. Di sela sidang-sidang yang ia ikuti, ketika ada waktu yang sedikit luang, ia memastikan untuk hadir di tengah masyarakat sambil membawa bantuan baik yang ia upayakan sendiri maupun ia kerjasamakan dengan pihak-pihak sumber pendanaan baik pemerintah maupun swasta.

"Khusus bantuan kali ini, kami upayakan dengan beberapa pihak terutama dunia usaha yang menyisihkan sebagian keuntungannya untuk pengab-

dian kepada masyarakat. Kita doakan, semua pihak yang memberikan kontribusi sumbangan nyata ini, semakin menguat institusinya dan semakin membesar skala usahanya", tutur Nevi.

Nevi dalam setiap kegiatan di lapangan, selalu berupaya untuk menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam berkumpul secara langsung di lapangan. Menjaga Jarak, Pakai masker, Hand sanitizer selalu diupayakan seiring penerapan protokol kesehatan.

"Kerja dan kinerja kita semua jangan sampai terganggu ya, dengan adanya pandemi ini. Sambil kita berdoa agar pandemi cepat berakhir, tapi upaya-upaya kegiatan untuk kebaikan jangan sampai berhenti. Bergerak itu harus, seperti air mengalir untuk memberi manfaat kepada seluruh wilayah yang dilewati. Mohon doa tetap istiqomah, dan semoga manfaat dari upaya renovasi pembangunan panti serta masjid ini semakin menguatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada yang maha kuasa", kata Nevi Zuairina menutup pidatonya.



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

Khusus bantuan kali ini, kami upayakan dengan beberapa pihak terutama dunia usaha yang menyisihkan sebagian keuntungannya untuk pengabdian kepada masyarakat. Kita doakan, semua pihak yang memberikan kontribusi sumbangan nyata ini, semakin menguat institusinya dan semakin membesar skala usahanya



Hadiri Reses

Anis Serahkan Mobil Ambulans untuk Warga

KUTIPAN

Jakarta (22/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Anis Byarwati, mengunjungi kelurahan Cipinang Melayu kecamatan Makasar Jakarta Timur pada Senin (21/12/2020).

Anis turun ke tengah masyarakat untuk mengisi kegiatan di masa reses DPR RI. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Anis untuk bersilaturahmi secara khusus dengan pengurus DKM masjid Al-Muqorobin yang beralamat di RT.05 RW.03.

Silaturahmi yang berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan ketat tersebut berlangsung dalam rangka penyerahan bantuan mobil ambulans yang diperuntukkan bagi warga sekitar masjid, khususnya warga di RW.03 dan juga RW sekitarnya.

Dengan penduduk sekitar masjid yang cukup padat, diharapkan mobil ambulans ini bisa membantu kebutuhan warga untuk segera mendapat-

kan sarana transportasi Kesehatan saat dibutuhkan.

Acara serah terima dihadiri oleh jajaran pengurus DKM masjid Al-Muqorobin dengan ketua DKM H. Muhammad Thohir SPd.I, para pengurus RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Turut hadir mendampingi Anis yaitu Ketua DPRa PKS Cipinang Melayu, Dwiki Ananto Yudo, Ketua DPC PKS Makasar, Hasta Demon, Ketua Bidang Kesra DPD PKS Jakarta Timur, Ahanas Suebu dan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD PKS Jakarta Timur, Sugiyanti.

Pada sambutannya, Anis yang terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini menyampa-

kan rasa syukur dan terima kasih atas sambutan dari pihak DKM Masjid Al Muqorobin yang begitu hangat dan tertib.

Anis juga menyampaikan harapan serta do'a, semoga mobil ambulans yang diserahkan tersebut dapat bermanfaat dan membantu memenuhi kebutuhan warga.

"Saya merasa bahagia mendapat kesempatan membantu warga di Jakarta Timur. Semoga silaturahmi yang terjalin saat ini dapat berlanjut terus di hari-hari ke depan," kata Anis.

Sementara ketua DKM Muhammad Thohir, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Anis atas perhatian yang diberikannya sebagai anggota DPR RI kepada masyarakat Jakarta Timur, khususnya masyarakat di daerah Cipinang Melayu.

Muhammad Tohir menyampaikan bahwa sebagai masjid yang cukup besar dan berada di tengah lingkungan padat, masjid Al-Muqorobin merupakan masjid yang hidup dengan jamaah yang banyak.

"Kehadiran mobil ambulans ini, menjadi sangat berarti karena jamaah masjid dan masyarakat di sekitar bisa mendapatkan manfaat lebih banyak dengan kemudahan mengakses mobil ambulans," tuturnya.

Muhammad Tohir berjanji akan merawat mobil ambulans dengan baik sehingga bisa memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat.



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

"Saya merasa bahagia mendapat kesempatan membantu warga di Jakarta Timur. Semoga silaturahmi yang terjalin saat ini dapat berlanjut terus di hari-hari ke depan,



*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*



Masa Reses, Rofik Serahkan Ambulance dan Bantuan Usaha bagi Masyarakat Terdampak Pandemi

KUTIPAN

Purbalingga (22/12) --- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Rofik Hananto

menyerahkan bantuan Covid-19 berupa 1 unit mobil ambulance di Purbalingga dan bantuan usaha senilai Rp. 40 Juta untuk kelompok terdampak pandemi covid-19 di Kabupaten Kebumen.

Hadir pada acara ini Anggota DPR RI Rofik Hananto, Staf Ahli Bupati Purbalingga Sridhadi, Kepala SKK Migas diwakili pjs Manajer Senior Hubungan Humas Perwakilan Jabanusa Wahyu Dono, Tokoh Purbalingga Triyono Budi Sasongko beserta istri, Kepala Desa Blater Sukamto dan pengurus dari 2 Yayasan / Perkumpulan.

Bantuan 1 unit mobil ambulance diserahkan kepada yayasan langit biru bumi berdaya di Purbalingga. Selain itu diserahkan juga bantuan usaha untuk budidaya ikan lele dan ikan gurame senilai Rp. 40

Juta untuk kelompok terdampak pandemi covid-19 di Kabupaten Kebumen dibawah Perkumpulan "Relawan Indonesia" RELINDO Kabupaten Kebumen.

Rofik mengatakan bantuan ini bersumber dari dana CSR salah satu mitra Komisi VII DPR RI yaitu SKK Migas.

"Pandemi covid-19 memberi dampak 3 sektor utama yakni kesehatan, ekonomi dan sosial. Untuk sektor kesehatan dan ekonomi, semua stakeholder, termasuk SKK Migas - KKKS sangat berperan aktif menanggulangi dampaknya," kata Rofik usai penyerahan bantuan di Rumah Berdaya di Kalimanah.

Anggota Fraksi PKS DPR RI itu menambahkan, melalui bantuan itu diharapkan berdampak pada sektor kesehatan dan ekonomi agar masyarakat tetap bisa produktif

kelanjutan kehidupan.

"Karena covid-19 berdampak pada banyak sektor kehidupan masyarakat yang terhenti dan pasti dampaknya kemana-mana. Bantuan ambulance ini wujud nyata peran aktif komisi VII DPR RI bersama SKK Migas untuk mengurangi dampak kesehatan," katanya.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah VII menambahkan, tujuan pemberian bantuan usaha untuk budidaya ikan lele dan ikan gurame di Kebumen adalah agar roda perekonomian masyarakat bisa terus bergerak. "Modal usaha ini diharapkan dapat terus menggerakkan roda perekonomian masyarakat untuk budidaya ikan lele dan ikan gurame di Kebumen," kata putra daerah Kabupaten Purbalingga ini.

Staf Ahli Bupati Purbalingga Sridhadi bahagia dan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh SKK Migas melalui Rofik Hananto.

Pengurus Yayasan Langit Biru Bumi Berdaya Padang Kusumo bersyukur atas



H. ROFIK HANANTO, S.E
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

Pandemi covid-19 memberi dampak 3 sektor utama yakni kesehatan, ekonomi dan sosial. Untuk sektor kesehatan dan ekonomi, semua stakeholder, termasuk SKK Migas - KKKS sangat berperan aktif menanggulangi dampaknya

terrealisasinya bantuan ini.

"Alhamdulillah melalui aspirasi yang diperjuangkan oleh Bapak Rofik Hananto bekerjasama dengan SKK Migas, 1 unit mobil ambulance

ini dapat terealisasi, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, insya Allah bantuan ini akan sangat bermanfaat dalam membantu masyarakat." Kata Padang

Sosialisasi Lambang Baru PKS

Fikri Faqih Serahkan 3 Mobil Layanan untuk DPC Percontohan

KUTIPAN

Semarang (22/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil IX Jawa Tengah, Abdul Fikri Faqih menyerahkan bantuan mobil

untuk pelayanan masyarakat kepada Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Tiga daerah Kabupaten Kota.

“Mobil layanan tersebut sudah menggunakan logo PKS yang baru, yakni kombinasi warna oranye, putih dan hitam,” urainya di sela kegiatan reses di Semarang, Selasa (22/12).

Lambang baru PKS, memiliki latar belakang berbentuk lingkaran berwarna oranye dengan lambang padkapas berwarna putih di tengahnya. Kemudian di bawahnya terdapat nama PKS dengan huruf kapital berwarna hitam.

Fikri menjelaskan, dari segi warna, oranye melambangkan kehangatan, harapan, dan optimisme. Sedangkan warna putih melambangkan kesucian, ketulusan, kebersihan, keikhlasan, dan kemuliaan.

Kemudian warna hitam melambangkan kemauan keras, disiplin, kekuatan, ketegasan, berwisata, kepastian, aspiratif dan perlindungan.

“Ketiga warna yang baru ini akan melambangkan profil PKS baru yang lebih progresif, kini, inklusif, dan lebih menghargai keberagaman di tengah masyarakat kita yang heterogen,” ujarnya.

Soal inklusifitas PKS kedepannya, menurut Fikri adalah sebuah keniscayaan untuk mengakomodasi profil pemilih PKS yang kian beragam dan milenial. Meski demikian, PKS lanjut Fikri tetap dengan karakter lamanya untuk melayani masyarakat.

“Tetap dengan karakter khas PKS, yakni senantiasa hadir bersama melayani masyarakat,” tandasnya.

Sebelumnya, penyerahan

ketiga mobil tersebut diserahkan langsung kepada pengurus DPTD PKS di Dapil IX Jawa Tengah meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes.

Berturut-turut yang menerima adalah Ketua DPTD PKS Kota Tegal, Amiruddin; Ketua DPTD PKS Kabupaten Tegal, Arif Budiono; dan Sekertaris Umum DPTD PKS Kabupaten Brebes, Mizan.

Selain menyerahkan 3 mobil layanan, pada waktu reses DPR ini, Fikri juga meluncurkan 3 Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS Mandiri yang akan menjadi DPC percontohan.

Masing-masing adalah DPC PKS Tegal Timur Kota Tegal; DPC PKS Slawi Kabupaten Tegal; dan DPC PKS Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.

“DPC percontohan tersebut memiliki keunggulan dari sisi kaderisasi, manajerial, dan ekonomi. Langkah ini diambil sebagai persiapan untuk mencapai target 15 persen Kemenangan 2024 di Dapil Jateng IX,” ungkapnya.

Menurut Fikri, ketiga DPC



Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah IX

Soal inklusifitas PKS kedepannya, adalah sebuah keniscayaan untuk mengakomodasi profil pemilih PKS yang kian beragam dan milenial. Meski demikian, PKS lanjut Fikri tetap dengan karakter lamanya untuk melayani masyarakat.

ini akan dipersiapkan dan ditraining agar bisa mandiri dari tiga hal itu.

“Dari kapasitas SDM, setidaknya harus memiliki kemampuan mengelola SDM,

memiliki sumber pendanaan dan kemampuan manajerial organisasi. Tiga pilar utama ini menjadi pilar utama kememandirannya DPC PKS,” pungkasnya.



Masa reses, Iskan Adakan Kegiatan Khitanan Massal

KUTIPAN

Padangsidempuan (25/12) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis menggandeng klinik panca medika kota padangsidempuan dan klinik prima sehat simpang gambir kabupaten mandailing natal,

menyelenggarakan khitanan massal di dua kota/kabupaten tersebut pada reses masa sidang II tahun 2020-2021 (19/12/2020).

Acara khitanan massal ini diikuti ratusan peserta. Di klinik panca medika kota Padangsidempuan diikuti oleh peserta yang tersebar dari perwakilan seluruh kecamatan yang ada di kota Padangsidempuan, tidak kurang dari 70-80 anak mengikuti kegiatan khitanan massal ini.

Sementara itu, di klinik prima sehat simpang gambir kabupaten madina, setidaknya ada perwakilan dari 4 kecamatan yang ada di kabupaten mandailing natal dan tidak kurang dari 30-40 anak yang menjadi peserta khitanan massal ini.

Apalagi ini dilakukan ramai-ramai," imbuh Iskan.

Iskan mengucapkan terimakasih kepada seluruh panitia yang terlibat dalam kegiatan khitanan massal ini, baik itu tenaga kesehatan di klinik panca medika kota padangsidempuan dan klinik prima sehat simpang gambir kabupaten mandailing natal, serta atensi masyarakat sekitar yang mendukung kegiatan sosial ini.

"Harapan saya kedepannya agar kegiatan khitanan massal ini bisa dirutinkan, karena dengan adanya kegiatan ini, semoga bisa meringankan beban masyarakat, apalagi ditengah pandemi ini yang tak kunjung usai. Saya juga mendoakan agar peserta khitanan ini nantinya menjadi anak yang soleh dan berguna bagi nusa dan bangsa serta dapat mempraktekkan akhlak yang mulia ditengah-tengah masyarakat" pungkasnya

"Acara ini adalah program sosial saya sebagai wakil rakyat kepada masyarakat di daerah pemilihan saya, ini merupakan target kegiatan rutin yang dilaksanakan, sebelumnya juga tahun lalu diadakan kegiatan yang sama di kabupaten padang lawas, padang lawas utara, dan mandailing natal, dan biasanya diadakan dipenghujung tahun, atau bertepatan pada liburan anak-anak sekolah," ungkapnya.

Iskan mengaku sangat mengapresiasi kegiatan positif ini. Seperti diketahui bahwa selain untuk kesehatan, khitan juga merupakan tuntutan bagi kaum laki-laki dalam agama Islam.

"Saya senang anak-anak sudah mau dan berani. Khitan itu bukan hal yang menakutkan.



H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Anggota Komisi VIII DPR RI

"Acara ini adalah program sosial saya sebagai wakil rakyat kepada masyarakat di daerah pemilihan saya, ini merupakan target kegiatan rutin yang dilaksanakan, sebelumnya juga tahun lalu diadakan kegiatan yang sama di kabupaten padang lawas, padang lawas utara, dan mandailing natal, dan biasanya diadakan dipenghujung tahun, atau bertepatan pada liburan anak-anak sekolah.



Hermanto Berharap Tahun 2021 Sumbar Punya Instalasi Pemusnah Limbah B3

Padang (25/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hermanto dalam kunjungan kerjanya di Dapil Sumatera Barat (Sumbar) I mengunjungi lokasi pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (Penyediaan Shelter/Rumah Insinerator) di Air Dingin, Koto Tengah, Kota Padang.

Pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 tersebut direncanakan selesai dan bisa dioperasikan di tahun 2021.

"Pada tahun 2021 Sumbar akan memiliki fasilitas pemusnah limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, limbah B3 di Sumbar tidak perlu lagi dibawa ke Jawa untuk dimusnahkan", ucap Hermanto.

Pengiriman limbah B3 ke Jawa, tambahnya, disamping biayanya mahal juga beresiko tercecer di jalan.

"Kalau tercecer di jalan tentu akan membahayakan masyarakat di lokasi tercecernya sampah tersebut," ucapnya.

Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 tersebut dibangun dengan dana APBN. Pada fasilitas tersebut ada instalasi yang mampu memusnahkan limbah dengan kapasitas 300 kg/jam. Suhu di dalam instalasi tersebut bisa mencapai 800 °C.

"Setelah keluar dari instalasi pemusnah tersebut, limbah sudah menjadi abu," jelas legislator dari FPKS ini.

Abu dari limbah tersebut, lanjutnya, dikemas lalu dikirim ke Jawa untuk dimusnahkan.

"Walaupun sudah dalam bentuk abu tetap harus dimusnahkan," ujarnya.

"Jadi fasilitas pemusnah limbah B3 di Sumbar ini tidak ada limbahnya, tidak mencemari lingkungan. Karena itu masyarakat sekitar tidak perlu cemas," pungkask Hermanto



Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

Pada tahun 2021 Sumbar akan memiliki fasilitas pemusnah limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, limbah B3 di Sumbar tidak perlu lagi dibawa ke Jawa untuk dimusnahkan

Hadir bersama Anis pada
Silaturahmi UMKM
Jakarta Timur

Jazuli **Sampaikan** Pesan Berbisnis sesuai Syari'ah

● KUTIPAN

Jakarta (25/12) --- "Dialah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu (QS. Al-Baqarah : 29).

Allah SWT menciptakan bumi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Hadits Rasulullah SAW juga menyebutkan 'Sembilan dari sepuluh pintu rejeki ada dalam perdagangan'. Bahkan para sahabat melantunkan do'a 'Ya Allah, jadikanlah dunia di tangan kami, bukan di hati kami'.

Kalimat ini menjadi pembuka sambutan Jazuli Juwaini Ketua Fraksi DPR RI dalam acara silaturahmi anggota DPR RI dari PKS daerah pemilihan Jakarta Timur dengan para pelaku UMKM di Jakarta (25/12/2020).

Sebagai Anggota Fraksi PKS, Anis sengaja mengundang Jazuli untuk memberikan sambutan mengingat dalam acara ini Anis juga

menyerahkan sejumlah bantuan untuk para pelaku UMKM di Jakarta Timur.

Bantuan tersebut merupakan hasil kerja sama Anis dengan mitra kerjanya di komisariat XI DPR RI.

Atas kerjasama Anis dengan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), terealisasi bantuan penambahan barang senilai Rp 780 juta untuk pengembangan usaha bagi 9 kelompok usaha dengan jumlah penerima sekitar 70 orang.

Para pengusaha yang tersebar di seluruh Jakarta Timur ini, memiliki bidang usaha diantaranya penjahit, catering, produsen kue kering, penjual pakaian, laundry, penjual makanan minuman, penjual makanan beku, budi daya ikan,

petani hidroponik, dsb.

Melanjutkan sambutannya, Jazuli mengatakan bahwa ayat dan hadits diatas, menjadi landasan kita dalam upaya pengembangan UMKM.

"Jadi aktifitas ekonomi ini adalah tuntutan syar'i", bukan sekedar upaya perbaikan ekonomi dan kehidupan kita," katanya.

Jazuli juga menambahkan agar dalam berusaha yang menjadi modal bukan hanya uang. Modal utama yang lebih penting adalah kemauan dan keinginan yang kuat untuk berusaha. Melihat potensi yang ada disekitar, melakukan perencanaan, memulai kecil-kecilan, dan tawakal kepada Allah SWT.

Menutup sambutannya, Jazuli mengingatkan agar semua yang hadir meluruskan niat karena Allah SWT dalam menjalankan usahanya.

"Fokus dengan apa yang akan dikerjakan dalam usahanya. Dan semoga usaha yang dilakukan para pelaku UMKM berkontribusi besar untuk pembangunan ekonomi nasional", urainya.

Sementara Anis sebagai tuan rumah dalam acara ini, berterima kasih atas sambutan yang diberikan Jazuli dan pesan-pesan yang sangat berarti bagi para pelaku UMKM yang hadir.

Anis pun mengajak para peserta untuk menerapkan pesan-pesan yang telah disampaikan Jazuli tadi.



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Agar dalam berusaha yang menjadi modal bukan hanya uang. Modal utama yang lebih penting adalah kemauan dan keinginan yang kuat untuk berusaha. Melihat potensi yang ada disekitar, melakukan perencanaan, memulai kecil-kecilan, dan tawakal kepada Allah SWT".

Purna Pekerja Migran Perlu Dukungan agar Mandiri,

Netty: Kewajiban Negara Mengayomi

KUTIPAN

Cirebon (27/12) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani, mengingatkan negara untuk mengayomi purna pekerja migran agar mandiri dan hidup layak di negeri sendiri.

"Pekerja migran yang telah kembali ke tanah air harus dapat hidup mandiri secara layak di tanah air. Jangan sampai mereka merasa hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri akibat kurang mendapat dukungan dari pemerintah. Ini kewajiban negara untuk mengayomi purna PMI," tandas Netty usai memberikan motivasi kepada para purna PMI yang hadir dalam acara Bakti Sosial Untuk Pekerja Migran dan Keluarganya yang digagas oleh DPP PKS Bidang Ketenagakerjaan dan Bidang Kesos di Desa Ambulu, Losari, Kab. Cirebon, Sabtu, (26/12/2020).

Menurut Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial ini, pandemi Covid-19 membuat semua sektor usaha terdampak, tak terkecuali para

purna PMI dan keluarganya yang harus bertahan di tengah kesulitan ekonomi.

"Purna pekerja migran ingin tetap bersama keluarga di tanah air, namun kesulitan hidup membuat mereka kembali berangkat ke luar negeri. Angka pengangguran semakin tinggi, lapangan kerja berkurang, dan peluang kerja dalam negeri pun terbatas. Tidak heran jika masyarakat memilih migrasi ke luar negeri. Ironisnya, fakta di lapangan tidak hanya kisah sukses, tapi banyak juga kisah sedih, pilu, dan mengharukan yang terjadi pada para pekerja migran kita," katanya.

Didorong oleh kepedulian terhadap purna pekerja migran, Netty berbagi paket sembako dalam rangka memaknai Hari

Kesetiakawanan Sosial Nasional sekaligus Hari Migran Internasional.

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI ini, semangat kesetiakawanan sosial atau gotong royong harus terus dibangun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Setia kawan, saling membantu, dan gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia yang harus terus dipelihara. Jangan sampai semangat ini tercerabut dari jiwa rakyat Indonesia," ungkap Netty yang juga wakil ketua Fraksi PKS DPR RI.

Pada kesempatan tersebut, Netty didampingi Nurholis, legislator PKS DPRD Kabupaten Cirebon.

"PKS sebagai partai pelayan rakyat meminta para kadernya, terutama yang telah menjadi pejabat publik agar datang menyapa, melayani, dan membantu masyarakat mencari solusi atas persoalan yang dihadapi, termasuk persoalan pekerja migran," ujarnya.

Kedatangan Netty mendapat sambutan dari masyarakat setempat.

"Terima kasih atas perhatian PKS kepada para purna pekerja migran dan keluarganya. Dukungan ini, sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan kami berharap PKS dapat menjadi jembatan aspirasi kami," ujar Sunaji, Kuwu Ambulu.

Sebagai penutup, Netty kembali mengingatkan negara



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI

Pekerja migran yang telah kembali ke tanah air harus dapat hidup mandiri secara layak di tanah air. Jangan sampai mereka merasa hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri akibat kurang mendapat dukungan dari pemerintah. Ini kewajiban negara untuk mengayomi purna PMI

agar bertanggungjawab memberikan pendampingan dan perlindungan kepada para pekerja migran, calon pekerja migran, dan keluarganya.

"Sejak pembekalan sebelum pemberangkatan, penempatan hingga

kepelangan dan reintegrasi PMI dengan masyarakat. Adanya jaminan perlindungan negara membuat pekerja aman bekerja di luar negeri, nyaman saat pulang, dan mampu mandiri saat kembali hidup bersama keluarga di tanah air," ujarnya.

Aleg PKS: Tingkatkan Semangat Belajar dan Dakwah melalui Kesenian Gambang Kromong di Depok

KUTIPAN

Depok (23/12) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid meresmikan bantuan alat kesenian tradisional Gambang Kromong,

di Sekertariat Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Gemar Ilmu, yang berlokasi di Jl. Akses UI, Kelurahan Pondok Cina, Kota Depok, pada Kamis (17/12).

Bantuan alat kesenian tradisional ini merupakan bentuk advokasi Nur Azizah kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) untuk melestarikan kearifan lokal khususnya yang menjadi ciri khas di dapil Nur Azizah yaitu Kota Depok.

Peresmian bantuan alat kesenian ini di gelar sekaligus dalam rangka sosialisasi Kesenian Tradisional Gambang Kromong sebagai bentuk penguatan kearifan lokal dalam rangka mencegah konflik sosial dan penyebaran paham radikalisme.

"Sebagai solusi alternatif

kegiatan remaja dalam bentuk Sanggar Gambang Kromong. Meningkatkan minat kebudayaan betawi dan melestarikannya. Serta untuk menambah minat dan bakat remaja di Depok untuk belajar dan berdakwah," ungkap Nur Azizah.

Hasan Basri, selaku pimpinan PKBM Gemar Ilmu, berterimakasih kepada Nur Azizah atas dorongannya, Kemensos RI dapat menyalurkan bantuan alat kesenian Gambang Kromong.

Ia juga berharap bantuan alat kesenian ini bisa menjadi perekat bangsa, serta dapat menjadi manfaat bagi sekitar khususnya warga Depok.

"Hari ini di Yayasan PKBM Gemar Ilmu alhamdulillah, setelah difasilitasi dan diadvokasi proposal kami ke

Kemensos RI oleh anggota DPR RI, alat kesenian tradisional, Gambang Kromong bisa hadir di tempat ini dan kami juga mengucapkan terimakasih banyak kepada ibu Nur Azizah", jelas Hasan.

Hasan juga berharap agar kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kota Depok dimana kesenian tradisionalnya masih bersinggungan dengan kota Jakarta yaitu kebudayaan Betawi, harus terus dijaga dengan baik.

"Harapannya kesenian Gambang Kromong wabil khusus di Kelurahan Pondok Cina ini bisa berkembang dan bisa menjaga kebudayaan di Kota Depok", terang Hasan

Pada Kegiatan yang turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok, Lurah Pondok Cina, LPM, Ibu-ibu Majelis Talim, Ketua RT 04, Ketua RT 02, Ketua RW 06, serta warga serta tokoh masyarakat, Nur Azizah menyampaikan harapannya agar Kesenian Tradisional Gambang Kromong ini tidak hanya sebagai sarana hiburan masyarakat, tetapi secara



Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Harapannya kesenian Gambang Kromong wabil khusus di kelurahan Pondok Cina ini bisa berkembang dan bisa menjaga kebudayaan di Kota Depok.

khusus bagi umat muslim, juga dapat menjadi sarana meningkatkan Semangat Belajar serta syiar dan dakwah melalui kesenian.

Selain itu, Nur Azizah mengatakan kepada warga agar jangan pernah letih membimbing anak-anaknya untuk belajar dan mengajarkan Al-qur'an.

"Saya mau mengingatkan jangan lupa untuk terus belajar dan mengajarkan Al-quran.

Apalagi bagi anak-anak yang masih lebih mudah menyerap ilmu. Disamping berkesenian melalui Gambang Kromong ini, harus juga diperhatikan belajar alqurannya agar tidak menjadi orang-orang yang merugi.

Sangat bagus, bila dalam Seni Gambang Kromong tersebut berisi pesan meningkatkan Semangat Belajar, Selengkapnyapun kunjungi fraksi.pks.id

Pesan Slamet di Muswil PKS Jawa Barat

KUTIPAN

Bandung (27/12) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Slamet mengucapkan selamat,

Kepada Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah atau DPTW PKS Jawa Barat hasil Musyawarah Wilayah yang digelar Minggu (27/12/2020), kepada Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah atau DPTW PKS Jawa Barat hasil Musyawarah Wilayah yang digelar Minggu (27/12/2020).

"Selamat kepada pimpinan DPTW yang sudah dilantik. Semoga dapat amanah," kata Slamet yang juga sebagai ketua Bidang pembinaan wilayah banjabar kepada media.

Presiden PKS Ahmad Syaikhul melantik secara daring dan serentak DPTW terpilih seluruh Indonesia pada saat Muswil tersebut.

Slamet berharap kepemimpinan baru DPTW PKS Jawa Barat yang telah dilantik tersebut dapat merealisasikan sejumlah target yang telah ditetapkan.

"Semoga di kepemimpinan baru dapat bekerja dengan baik untuk merealisasikan target-

target tanggapan sudah diamanahkan dalam muswil," ucapnya.

Dalam Muswil ini, kepemimpinan DPTW PKS Jawa Barat periode 2020 - 2025 mulai disampaikan ke publik.

Antara lain Ketua MPW Oded M Danial, Sekretaris Abdul Hadi Wijaya, Ketua Umum DPW Haru Suandharu, Sekretaris Ridwan Solichin, Bendahara Iwan Suryawan, Kabid Kaderisasi Alfian Syafii, Ketua DSW Abdul Jabar Majid, dan Sekretaris Tetap Abdul Latif.

Haru Suandharu yang terpilih menjadi Ketua Umum DPW PKS Jawa Barat 2020 - 2025 menambahkan, DPP PKS memberikan beberapa poin amanah di pundak DPTW periode 2020 - 2025, diantaranya merekrut kader dan meningkatkan jumlah kursi di DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kota dan DPRD Kabupaten.



drh. H. SLAMET

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IV

Selamat kepada pimpinan DPTW yang sudah dilantik. Semoga dapat amanah. Semoga di kepemimpinan baru dapat bekerja dengan baik untuk merealisasikan target-target tanggapan sudah diamanahkan dalam muswil



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI



Ya Robb... Engkau Maha Melihat apa yg kami tidak bsa lihat,, Engkau Maha Mengetahui apa yg kami tidak ketahui, maka lindungi lah kami dari berbagai keburukan... Aamiin.

10.00 PM · 29 Des 2020·Twitter for iPhone

Pilgub Sumbar Usai

Politisi PKS: Saatnya Masyarakat Kembali Bersatu Lanjutkan Pembangunan

KUTIPAN

Padang (22/12) -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto dalam kunjungan kerjanya di Dapil Sumatera Barat (Sumbar) I berharap masyarakat bisa segera melupakan dinamika selama masa kampanye Pilgub dan kembali bersatu membangun Sumbar.

Hermanto minta segenap elemen masyarakat mendukung gubernur dan wakil gubernur baru dalam merealisasikan janji-janji kampanyenya.

"Bantu gubernur dan wakil gubernur baru merealisasikan janji-janji kampanyenya membangun Sumbar. Hasil pembangunan nantinya akan dinikmati semua pihak, baik oleh yang memilih maupun yang tidak memilih gubernur dan wakil gubernur tersebut", papar Hermanto.

Menganggapi KPU Sumbar yang telah mengumumkan

pasangan Mahyeldi-Audy memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Gubernur Sumbar 2020.

Dalam pengumuman KPU tersebut, Mahyeldi-Audy memperoleh 32,43 persen suara sama dengan 726.853 suara, disusul berikutnya pasangan Nasrul Abit-Indra 30,30 persen atau 679.069 suara, Mulyadi-Ali Mukhni dengan 27,43 persen atau 614.477 suara dan Fakhri-Genius Umar 9,86 persen sama dengan 220.893.

"Kami ucapkan terima

kasih kepada masyarakat Sumbar yang telah berpartisipasi hadir memilih di TPS dalam Pilgub dan Pilkada di Sumbar. Apresiasi juga kepada penyelenggara Pemilu, alim ulama, ninik mamak, cerdas pandai, bunda kandung, pemuda dan semua pihak terkait sehingga pemilihan di Sumbar terlaksana dengan sukses," papar Hermanto.

Lebih jauh Hermanto menyebutkan, Sumbar memiliki banyak potensi yang masih perlu dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat seperti: pariwisata, panas bumi, pertanian, kelautan, perikanan, kesehatan, lingkungan hidup, budaya, kuliner, dan sebagainya.

"Semua itu akan bisa dikembangkan secara optimal bila pemerintah dan seluruh elemen masyarakat kompak dan semangat", pungkas Hermanto yang juga Ketua Dewan Penasehat Tim Relawan PaM-MAjo (Pasukan Militan Mahyeldi Audy Jinaldy) ini.



Dr. HERMANTO, S.E., M.M.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

Bantu gubernur dan wakil gubernur baru merealisasikan janji-janji kampanyenya membangun Sumbar. Hasil-hasil pembangunan nantinya akan dinikmati semua pihak, baik oleh yang memilih maupun yang tidak memilih gubernur dan wakil gubernur tersebut"

Indonesia **Harusnya** Tolak Pelecehan AS Berupa Iming-Iming Dana Rp 28 T, Bila Normalisasi Dengan Israel

KUTIPAN

Jakarta (29/12) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi sikap MUI, NU, Muhammadiyah, Ketua DPR, Fraksi PKS DPR RI, dan elemen masyarakat lainnya

yang telah secara terbuka menolak wacana yang diopinikan oleh sejumlah pihak maupun media Israel, bahwa ada kemungkinan Indonesia mengikuti langkah beberapa negara di Timur Tengah dengan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

Melalui keterangan pers tertulis di Jakarta (29/12), pria yang akrab disapa HNW ini memandang bahwa sikap Ormas-Ormas serta Partai dan DPR itu sejalan dengan sikap mensejajarkan Indonesia, juga sikap resmi Presiden RI Joko Widodo yang antara lain menyampaikannya dengan telepon langsung ke Presiden Palestina Mahmud Abbas; bahwa Indonesia tidak mengikuti arus normalisasi

dengan Israel, dan Indonesia akan konsisten dengan sikap dasarnya untuk membela Palestina agar menjadi negara merdeka dengan ibukota Yerusalem Timur.

Dalam posisi ini, HNW menilai manuver politik dari pihak Amerika Serikat (AS) mencurigakan, ketika Donald Trump sudah di bulan terakhir kekuasaannya, ternyata masih mencoba memperdagangkan pengaruhnya dan mengiming-imingi dana investasi US\$ 2 miliar (setara kurang lebih Rp 28,35 triliun), bila Indonesia mau lakukan normalisasi hubungan dengan Israel, sebagaimana dinyatakan melalui Kepala lembaga investasi AS untuk luar negeri (DFC) Adam Boehler (21/12).

HNW yang juga Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II (meliputi Luar Negeri) mengancam iming-iming investasi Amerika Serikat (AS) agar Indonesia ikut melakukan normalisasi dengan Israel.

"Itu jelas pelecehan terhadap kedaulatan Indonesia, yang secara historis dipegangnya sejak zaman Presiden Sukarno dan seterusnya. Marwah dan jati diri bangsa itu sangat mahal dan tentunya tak bisa dibeli apalagi dengan harga murah: 'hanya' Rp 28,35 T. Karena dari Tenaga Kerja Migran Indonesia saja, bisa dihadirkan devisa senilai Rp 157 T. Dan apalagi, iming-iming itu jelas melecehkan sikap terakhir dari Rakyat dan Pemerintah Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Ormas-Ormas seperti MUI, NU, Muhammadiyah, juga Orpol seperti PKS dan Gerindra, juga Parlemen (Ketua DPR), bahkan Menlu RI dan Presiden RI," ungkap HNW.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menilai bahwa iming-iming yang bisa jadi sogokan untuk pemerintah Indonesia



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Wakil Ketua MPR RI

Marwah dan jati diri bangsa itu sangat mahal dan tentunya tak bisa dibeli apalagi dengan harga murah: 'hanya' Rp 28,35 T. Karena dari Tenaga Kerja Migran Indonesia saja, bisa dihadirkan devisa senilai Rp 157 T.

tersebut, membuktikan bahwa normalisasi dengan Israel tidak ada hubungannya dengan membantu Palestina untuk mendapatkan kemakmurannya. Melainkan lebih merupakan proyek ekonomi dan bisnis yang

(diperkirakan) menguntungkan bagi negara yang lakukan normalisasi dan Israel serta sponsorinya; Amerika Serikat. Selengkapnyapun kunjungi fraksi.pks.id

Presiden PKS di Muswil se-Indonesia:

Tahun 2024 Momentum Kemenangan PKS

KUTIPAN

Jakarta (27/12) — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhul mengemukakan Tahun 2024 merupakan momentum kemenangan PKS.

Hal itu disampaikan dalam acara Musyawarah Wilayah (Muswil) se-Indonesia yang dilakukan serentak secara virtual di Kantor DPP PKS, Jakarta, Ahad, (27/12).

"Kepada seluruh keluarga besar PKS, saya tegaskan bahwa Tahun 2024 mendatang adalah momentum kemenangan kita," tegas Syaikhul.

Menurut Syaikhul, harapan masyarakat terhadap PKS sangat besar mengingat satu-satunya partai yang secara jelas bersikap oposisi. Di sisi lain, survey Litbang Kompas pada Oktober 2020 menunjukkan, ada sekitar 52,5 persen masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin.

"Ini peluang bagi PKS. Kita harus memastikan suara rakyat yang tidak puas tersebut berlabuh kepada kita," ujar Syaikhul. Ditambahkan Syaikhul, ini

merupakan momentum untuk membuat PKS menjadi partai yang semakin besar, semakin dicintai dan mendapatkan kepercayaan publik secara luas.

"Dengan kerja keras bersama, insya Allah tahun 2024 adalah momentum kemenangan bagi PKS.

Apakah saudara-saudara siap menyongsong kemenangan di 2024?" Tanya Syaikhul kepada peserta Muswil.

"Siap!", jawab mereka dengan lantang.

Syaikhul juga mengingatkan target capaian pemilihan legislatif nasional tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Munas V PKS bulan lalu, yakni minimal 15%. Selain itu juga ikut serta dalam mengusung kader PKS sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden di Pemilihan Presiden tahun 2024.

"Ini bukanlah sesuatu yang ringan, tetapi bukan juga

mustahil untuk dicapai. Saya minta kepada seluruh pengurus baik di pusat, wilayah dan daerah menjadikan amanat Munas ini sebagai acuan dan pedoman dalam merumuskan program kerja," pungkaskan Syaikhul.



H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi V DPR RI



Foto Donny PKSFOTO

Harapan masyarakat terhadap PKS sangat besar mengingat satu-satunya partai yang secara jelas bersikap oposisi. Di sisi lain, survey Litbang Kompas pada Oktober 2020 menunjukkan, ada sekitar 52,5 persen masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ini peluang bagi PKS. Kita harus memastikan suara rakyat yang tidak puas tersebut berlabuh kepada kita



Sekjen PKS: Muswil dan Musda Tahun 2020 Serentak Nasional secara **Virtual**

KUTIPAN

Jakarta (26/12) --- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) pada 27 Desember 2020 dan Musyawarah Daerah (Musda) pada 28 Desember 2020.

Jakarta (26/12) --- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) pada 27 Desember 2020 dan Musyawarah Daerah (Musda) pada 28 Desember 2020.

Kegiatan ini istimewa dan berbeda dengan Muswil dan Musda sebelumnya karena dilaksanakan virtual, secara serentak dan dalam waktu bersamaan di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia.

Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan bahwa langkah ini diambil untuk menyasiasi kondisi pandemi yang masih belum berakhir.

"Sampai saat ini kita masih pada masa pandemi Covid-19, sehingga pertemuan fisik dengan dalam jumlah yang banyak kita hindari. Hal ini yang mendorong PKS untuk melaksanakan kegiatan ini secara serentak dan dalam waktu bersamaan secara daring menggunakan teleconference. Ini adalah terobosan agar protokol kesehatan tetap terjaga dan mekanisme organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya.", ungkap Anggota Komisi III DPR RI ini.

Lebih lanjut Aboe Bakar menjelaskan bahwa peserta kegiatan ini terbagi dua, yaitu ada yang hadir secara fisik dan

ada yang hadir secara virtual.

"Kehadiran peserta ada yang melalui daring ada pula yang luring. Kegiatan utama berada di DPP PKS yang akan dihadiri secara terbatas oleh para pimpinan PKS, antara lain Presiden PKS, Sekjen, Bendum, Ketua MPP, Ketua DSP, dan para Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah. Kemudian di seluruh Provinsi nantinya para pengurus DPW akan mengikuti kegiatan ini secara bersama-sama. Selain itu para pengurus di berbagai tingkatan, anggota legislatif PKS di berbagai tingkatan, Kepala Daerah di berbagai tingkatan, dan seluruh kader serta simpatisan PKS juga akan mengikuti secara daring", ungkap Ketua Majelis Kehormatan Dewan DPR RI ini.

Aboe Bakar menjelaskan bahwa agenda utama dari Muswil adalah pergantian kepemimpinan di tingkat Wilayah/ Provinsi.

"Setelah kemarin dilaksanakan pergantian kepemimpinan di tingkat pusat melalui Munas V, ini adalah suksesi kepemimpinan PKS di tingkat Wilayah. PKS ini adalah partai kader, tentunya kita melakukan kaderisasi, salah satunya melalui forum Muswil V seperti ini; begitu juga dengan Musda untuk tingkat Kabupaten/ Kota", paparnya.

"Agenda pelantikan dan pembacaan sumpah jabatan seluruh kader yang akan mengemban amanah sebagai



HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Sekjen DPP PKS

"Sampai saat ini kita masih pada masa pandemi Covid-19, sehingga pertemuan fisik dengan dalam jumlah yang banyak kita hindari. Hal ini yang mendorong PKS untuk melaksanakan kegiatan ini secara serentak dan dalam waktu bersamaan secara daring menggunakan teleconference."

pimpinan partai di tingkat Wilayah dan pimpinan partai di tingkat Kabupaten/ Kota merupakan hasil dari proses demokrasi yang dilaksanakan PKS dengan melibatkan seluruh kader. Terakhir akan ada Pidato Politik Presiden PKS, H, Ahmad

Syaikh dengan tema 'Songsong Kemenangan 2024 dengan Mewujudkan Kepemimpinan yang Tangguh' di level nasional dan daerah.", tambah Aboe.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Presiden PKS Sampaikan 2 Arahannya Penting di Muswil Serentak

KUTIPAN

Jakarta (27/12) — Presiden PKS Ahmad Syaikhul menyampaikan dua arahan penting untuk menyongsong kemenangan di tahun 2024 dalam Musyawarah Wilayah serentak virtual, Ahad (27/12).

"Pertama, mari bangun dan munculkan kepemimpinan yang tangguh di tingkat wilayah. Kepemimpinan wilayah yang tangguh menjadi basis menuju kepemimpinan di tingkat nasional," ujar Syaikhul.

Syaikhul menekankan perlu ada penyeragaman kembali struktur di tingkat wilayah untuk memunculkan kepemimpinan yang tangguh ini.

"Semua kader terbaik PKS, termasuk anak-anak muda harus diberikan ruang berkarya di partai. Harus ada upaya yang terencana, sistematis dan masif untuk melakukan penokohan kepemimpinan," ucap Syaikhul.

Syaikhul menjelaskan PKS sudah dan akan terus menguatkan standar serta tradisi kepemimpinan berbasis

prestasi dan kompetensi.

"Setidaknya ada tiga standar kepemimpinan yang menjadi acuan PKS dalam melahirkan calon pemimpin bangsa, yaitu kredibilitas moral dan kredibilitas kinerja, kapasitas memenangkan kompetisi dan kapasitas untuk memimpin dan mengelola bangsa, serta PKS harus diterima oleh kader, struktur, maupun publik," tutur Syaikhul.

Syaikhul menyebutkan poin kedua adalah arahan untuk memperkuat ketahanan.

"Konsistensi dan persistensi dalam berjuang sangat menentukan. Dalam berjuang, kita harus memiliki ketahanan, nafas yang panjang, kesabaran, juga ketekunan," jelas dia.

Presiden PKS Instruksikan 5 Langkah Perkuat Ketahanan Politik

Jakarta (27/12) — Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhul menginstruksikan 5 langkah dalam rangka memperkuat ketahanan politik di Musyawarah Wilayah se-Indonesia, Ahad (27/12/2020). "Pertama, perkuat ketahanan pemikiran. Saya perintahkan agar platform kebijakan pembangunan PKS untuk terus digali, dikaji dan diimplementasikan sebagai panduan untuk perjuangan kita dalam merumuskan kebijakan publik," tutur Syaikhul.

Syaikhul menyebutkan keluarga adalah pondasi utama dakwah, jika keluarga kuat akan menjadikan dakwah semakin kuat.

"Kedua Perkuat ketahanan keluarga. Peran Ayah sebagai kepala keluarga sangat sentral dalam memimpin. Peran Ibu

sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya memegang peran strategis bagi tumbuh kembang anak-anak kita," jelas Syaikhul.

Syaikhul melanjutkan poin ketiga dari langkah pertahanan adalah memperkuat jasadiah dan kesehatan.

"Di tengah pandemi seperti ini, kesehatan menjadi prioritas penting. Kita harus lebih hati-hati dengan semakin ketat mentaati protokol kesehatan," ucap Syaikhul.

Selain aspek kesehatan, pertahanan ekonomi juga perlu dikuatkan di tengah kondisi pandemi saat ini.

"Kita harus bangun rasa solidaritas, saling tolong menolong sesama kader.

Stuktur harus sensitif dengan kondisi pengurus dan kader-kader PKS. Bantu kader yang

Perkuat ketahanan pemikiran. Saya perintahkan agar platform kebijakan pembangunan PKS untuk terus digali, dikaji dan diimplementasikan sebagai panduan untuk perjuangan kita dalam merumuskan kebijakan publik

mengalami kesulitan, apapun yang bisa kita bantu berikan sebaik-baiknya," pesan Syaikhul.

Terakhir Syaikhul mengingatkan untuk memperkuat ketahanan spiritual dengan memperbanyak zikir dan sholat, menegakkan sholat malam, tilawah, menghidupkan puasa sunnah serta menunaikan zakat dan sedekah.

Musda Serentak, Presiden PKS: Semua Daerah Satu Frekuensi Siapkan Kemenangan 2024

KUTIPAN

Jakarta (28/12) ---
Presiden Partai
Keadilan Sejahtera
Ahmad Syaikh
mengapresiasi

semangat yang dimiliki oleh
seluruh peserta Musyawarah
Daerah (Musda) dalam
persiapan kemenangan di
tahun 2024, Hotel Aston,
Jakarta, Senin (28/12).

"Semangatnya seperti
yang saya harapkan.
Alhamdulillah frekuensinya
sama dari pusat di Jakarta
hingga ke Papua, sampai ke
ujung barat Riau, semuanya
ingin mempersiapkan
kemenangan pada tahun
2024," tutur Syaikh.

Syaikh menambahkan
kesamaan yang dimiliki oleh
seluruh peserta Musda juga

pada keinginan untuk
memunculkan tokoh-tokoh di
daerah.

"Kita ingin munculnya
tokoh-tokoh daerah yang
dengan itu mudah-mudahan
juga kita sambil menyeleksi
tampilnya, munculnya, tokoh-
tokoh secara nasional," ucap
dia.

Syaikh berharap dengan
semangat yang dimiliki oleh
seluruh pengurus dari tingkat
pusat hingga daerah serta
dukungan dari semua kader
menjadi jalan menyongsong
kemenangan di tahun 2024.

"Tentu saja dengan
kebersamaan diantara kita ini
mudah-mudahan kita bisa
bersama songsong
kemenangan pada tahun
2024," ujarnya.

Sekjen PKS Sebut Isyarat Kemenangan di 2024

Jakarta (28/12) --- Sekretaris
Jenderal Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) Habib Aboe
Bakar Alhabsyi berharap
semangat dari peserta
Musyawarah Daerah (Musda) di
514 kabupaten/kota menjadi
isyarat kemenangan di tahun
2024 mendatang. Hotel Aston,
Jakarta, Senin (28/12).

"Saya melihat begitu aura
gairah dan semangat dari
seluruh peserta, dan Musda
berjalan dengan lancar.
Harapannya ini adalah isyarat
besar bahwa kita siap bekerja
untuk mengarah kemenangan
di 2024," ungkap Anggota
Komisi III DPR RI ini.

Habib Aboe menyakini
lewat Musda yang dilakukan
secara virtual ini kalimat tekad
yang tertanam di seluruh
wilayah hingga daerah adalah
tekad kemenangan dakwah.

"Saya yakin dan percaya
kelimat tekad kita adalah
kemenangan dakwah, yaitu
tingkatkan jumlah kader
maksimal dan menang di
semua elektoral," ucap Ketua
Mahkamah Kehormatan Dewan
DPR RI.

Habib Aboe mengingatkan
kepada seluruh kader bahwa
tidak ada waktu lagi untuk
beristirahat karena jarak
menuju 2024 bukanlah waktu
yang lama.

"Panggilan dakwah sudah
menanti kita. Momentum ini
tidak lama, tinggal beberapa
tahun saja, waktu kerja kita
juga tidak lama," ujar dia.

Dia berpesan kepada
seluruh pemimpin baru yang
pilih di wilayah maupun
daerah untuk bekerja juga
mensiarkan lambang serta
hymne dan mars baru PKS.

Presiden PKS Ahmad Syaikh bersama Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi saat meninjau langsung kegiatan Musda PKS yang diselenggarakan di seluruh Kota dan Kabupaten se Indonesia, Senin (28/12).



Kita ingin muncul-
nya tokoh-tokoh da-
erah yang dengan
itu mudah-mudahan
juga kita sambil
menyeleksi tampil-
nya, munculnya,
tokoh-tokoh secara
nasional

"Selamat bekerja dan
menangkan semua aktivitas
dakwah kita. Lambang kita yang
baru, hymne dan mars kita yang
baru, Syiarkan! Mudah
mudahan dalam tahun ini
sudah selesai," tandas dia.



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan
Setiap Pekan***